

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
BATU**

SKRIPSI



Oleh

DESY CHOLIFAH

NIM : 15520015

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
BATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

(S.Akun)



Oleh

DESY CHOLIFAH

NIM: 15520015

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BATU**

SKRIPSI

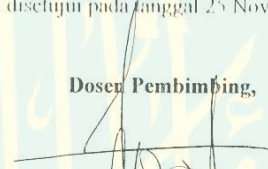
Oleh:

DESY CHOLIFAH

NIM : 15520015

Telah disetujui pada tanggal 25 November 2019

Dosen Pembimbing,



Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA

NIP. 197707702 200604 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
BATU**

SKRIPSI

Oleh

DESY CHOLIFAH

NIM : 15520015

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 16 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

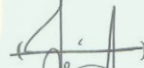
1. Ketua
Nawirah, SE., MSA., Ak
NIDT : 19860105 20180201 2 185

:



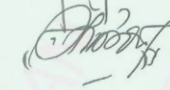
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA
NIP : 19770702 200604 2 001

:



3. Penguji Utama
Hj. Nina Dwi Styaningsih, SE., MSA
NIDT : 19751030 20160801 2 048

:



Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,
Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desy Cholifah
NIM : 15520015
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

"PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU"

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Desember 2019

Hormat saya,



Desy Cholifah

NIM : 15520015

HALAMAN MOTTO

*Terasa sulit ketika merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah ketika
menginginkannya
(Annie Gottlier)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kesabaran, dan kekuatan kepada saya dalam setiap langkah agar menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu berusaha dan tidak putus asa.

Buku Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu” ini saya persembahkan untuk:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku Institusi tempat saya menimba ilmu.

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya belajar ilmu akuntansi.

Bapak Sumatho dan Sarni Sebagai orang tua sayayang selalu mendo'akan dan senantiasa memberikan support terus berjuang kepada saya.

Seluruh Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk terus melangkah maju dan pentang menyerah

Serta kepada orang-orang yang selalu menanyakan kapan saya lulus.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan dan menjaga mereka dalam naunganNya amin.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. IbuDr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama menjadi mahasiswa akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang.
5. Ibu HJ. Meldona, SE., MM., Ak., CA selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua Orang tua saya, Bapak Sumatho dan Ibu Sarni, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat, motivasi, serta dukungan yang tak pernah putus.
8. Terimakasih kepada saudara lelaki saya Moh. Edi Suyanto beserta istrinya Roziant Rosmawati Syah dan kedua adek perempuan saya Sefti Rofiko dan

Fatimatuz zahro dan tidak lupa juga mbah-mbah saya serta keluarga besar, terimakasih atas doa dan dukungan selama ini.

9. Seluruh karyawan bagian keuangan SKPD Pemerintah Kota Batu yang meluangkan waktunya membantu dalam berjalannya penelitian dan Bapak Andhang Budi Harsa selaku pimpinan di Sekretariat Pemerintah Kota Batu yang selalu membimbing dan membantu peneliti.
10. Terimakasih juga kepada calon pendamping saya Achmad Iffani yang selalu mendampingi dan mau mengikuti kemauan saya dan mengingatkan untuk mengerjakan tugas skripsi ini.
11. Teman-teman kosdan sahabat saya isma, icha, puput, amna, mitadan shinta terimakasih atas dukungan kalian dan juga kebersamaan serta candaan yang sangat kocak dari kalian yang bisa membuat saya tertawa disaat alu bersedih dan terimakasih atas rasa kekeluargaan yang telah kalian berikan.
12. Teman-teman Akuntansi angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan terimakasih atas kenangan yang sangat berkesan selama empat tahun ini.
13. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal 'Alamiin.

Malang, 26 November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL COVER DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia	19
2.2.2 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	21
2.2.3 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	32
2.2.4 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	35
2.3 Kerangka Konseptual	40
2.4 Hipotesis Penelitian	43

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2 Lokasi Penelitian	47
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	47
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	49
3.5 Data dan Jenis Data	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data	50
3.7 Devinisi Operasional Variabel Penelitian.....	51
3.8 Analisis Data	61
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	61
3.8.2 Uji Validitas	62
3.8.3 Uji Reabilitas.....	62
3.8.4 Uji Asumsi Klasik.....	62
3.8.5 Uji Hipotesis	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1 Hasil Penelitian.....	67
4.1.1 Gambaran Umum Kota Batu.....	67
4.1.2 Gambaran Umum Pemerintah Kota Batu.....	68
4.1.3 Visi dan Misi Pemerintah Kota Batu	70
4.1.4 Struktur Organisasi.....	71
4.1.5 Karakteristik Responden	77
4.1.6 Uji Analisis Statistik Deskriptif	81
4.1.7 Uji Validitas	82
4.1.8 Uji Reabilitas.....	86
4.1.9 Uji Asumsi Klasik	88
4.1.9.1 Uji Normalitas	88
4.1.9.2 Uji Multikolinearitas.....	89
4.1.9.3 Uji Heteroskedastisitas	91
4.1.10 Uji Hipotesis.....	92
4.1.10.1 Secara Parsial (Uji t).....	92
4.1.10.2 Secara Simultan (Uji F)	95

4.1.10.3 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2).....	97
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	98
4.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Y)	98
4.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Y)	100
4.2.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) Terhadap Kualitas Lporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Y)	101
4.2.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Y)	103
BAB V PENUTUP.....	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Karyawan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Batu	48
Tabel 3.2 Devinisi Operasional Variabel	52
Tabel 4.1 Jumlah Kuesioner yang disebar	77
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	78
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	79
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	80
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif	81
Tabel 4.7 Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1).....	83
Tabel 4.8 Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2).....	84
Tabel 4.9 Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)	85
Tabel 4.10 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	86
Tabel 4.11 Uji Reabilitas.....	87
Tabel 4.12 Uji Normalitas (Komogrov-Smirnov).....	88
Tabel 4.13 Uji Multikolonieritas.....	90
Tabel 4.14 Uji Heteroskedastisitas.....	91
Tabel 4.15 Uji Parsial (Uji t) X1-Y.....	92
Tabel 4.16 Uji Parsial (Uji t) X2-Y.....	93
Tabel 4.17 Uji Parsial (Uji t) X3-Y.....	94
Tabel 4.18 Uji Simultan (Uji F).....	96
Tabel 4.19 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batu	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian

Lampiran 4 Hasil Uji Penelitian

Lampiran 5 Bukti Konsultasi

Lampiran 6 Biodata Peneliti

Lampiran 7 Bukti Plagiasi



ABSTRAK

Cholifah, Desy. 2019, SKRIPSI, Judul: “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu”.

Pembimbing : Hj. Meldona., SE., MM., Ak., CA

Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Laporan keuangan merupakan representasi posisi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkeahlian, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu.

Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi meliputi seluruh pegawai keuangan diseluruh SKPD Pemerintah Kota Batu. Sampel didapat dengan menggunakan teknik sampel jenuh data diperoleh 45 responden dengan penyebaran kuesioner dan teknik analisis data menggunakan uji analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan SPSS versi 16.

Hasil penelitian ini secara parsial diperoleh nilai $t_{hitung} 3.021 > t_{tabel} 1,682$ menunjukkan kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu, Penerapan Standar Akuntantansi Pemerintah diperoleh nilai $t_{hitung} 4.073 > t_{tabel} 1.682$ menunjukkan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh nilai $t_{hitung} 6.165 > t_{tabel} 1.682$ berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu. Secara simultan menunjukkan nilai $f_{hitung} 12.085 > f_{tabel} 2.82$ bahwa setiap variabel berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Batu. Jadi, dapat dikatakan bahwa ketiga variabel telah diimplementasikan dengan baik sehingga dapat menjadikan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu semakin berkualitas.

ABSTRACT

Cholifah, Desy. 2019, THESIS, Title: "The Effect of Human Resources Competence, Application of Government Accounting Standards and Regional Financial Accounting Systems on the Quality of the Batu City Government's Financial Statements".

Advisor : Hj. Meldona., SE., MM., Ak., CA

Keywords : Quality of Financial Statements, Human Resource Competencies, Government Accounting Standards, Regional Financial Accounting System.

Financial statements are a representation of the financial position performed by an entity. To realize the required financial reports, qualified Human Resources, Application of Government Accounting Standards and Regional Financial Accounting Systems to improve the accountability of local government financial reports. This study aims to determine the effect of human resource competence, the application of government accounting standards, and regional financial accounting systems toward the quality of the financial statements of the Batu city government.

This research uses descriptive quantitative analysis with the technique of distributing questionnaires to 45 financial employee respondents through the Regional Apparatus Work Unit of Batu City Government. The sample technique used is saturation sampling and Data analysis used in this research is descriptive statistical analysis test, validity test, reliability test, classic assumption test, and hypothesis testing with SPSS version 16.

The results of this study partially show the value of $t_{\text{calculate}}$ is $3.021 > t_{\text{table}}$ 1.682 which indicate the competence of Human Resources affects the quality of the financial statements of the City Government of Batu, $t_{\text{calculate}}$ value of The application of Government Accounting Standards is $4.073 > t_{\text{table}}$ 1.682 which influences the quality of the financial statements of Batu City Government, and The Regional Financial Accounting System value of $t_{\text{calculate}}$ is $6.165 > t_{\text{table}}$ 1.682 influences the quality of Batu City Government's financial statements. Simultaneously shows the value of $f_{\text{calculate}}$ $12.085 > f_{\text{table}}$ 2.82 which mean that each variable influences the quality of the Batu City Government's financial statements. So, it can be said that the three variables have been implemented well so that it can make the financial statements of the City Government of Batu become more proper.

مستخلص البحث

خليفة، دسي. ٢٠١٩، البحث العلمي، الموضوع "أثر كفاءة الموارد البشرية، تطبيق معايير المحاسبة الحكومية ومنظومة المحاسبة المالية الدائرة على جودة البيانات المالية الحكومة مدينة باتو".

المشرفة : الحاجة ميلدونا الماجستير.

الكلمات المفتاحية: جودة البيانات المالية، كفاءة الموارد البشرية، معايير المحاسبة الحكومة، منظومة المحاسبة المالية الدائرة.

البيانات المالية هي تمثيل الوضع المالي الذي يؤديه الكيان. لموجود البيانات المالية الجيدة تحتاج موارد بشرية ماهرون، تطبيق المعايير المحاسبة الحكومة ومنظومة المحاسبة المالية الدائرة لإرتفاع المساءلة البيانات المالية الحكومة الدائرة. يهدف هذا البحث لمعرفة أثر كفاءة الموارد البشرية، تطبيق معايير المحاسبة الحكومة ومنظومة المحاسبة المالية الدائرة على جودة البيانات المالية الحكومة مدينة باتو.

يستخدم هذا البحث كميًا بالنهج الوصفي. يتكون السكان من جميع العوامل المالي في جميع (SKPD) الحكومة مدينة باتو. ينال النموذج باستخدام التقنية الأتموزج المشبعة ٤٥ المستطلعين من البيانات بانشار الإستطلاع ويستخدم التقني لتحليل البيانات إختبارا تحليلا إحصائيا وصفيا، إختبارا صلاحيا، إختبارا موثوقيا، إختبارا إفتراضا كلاسيكيا، وإختبارا فرضيا ب (SPSS) صيغة ١٦.

ينال حاصل من هذا البحث قيمة $(t_{hitung}) < 3.021$ $(t_{tabel}) < 1682$ تدل كفاءة الموارد البشرية التي تؤثر على جودة البيانات المالية الحكومة مدينة باتو، ينال تطبيق معايير المحاسبة الحكومة على القيمة $(t_{hitung}) < 4.073$ $(t_{tabel}) < 1682$ تدل ان تؤثر على جودة البيانات المالية الحكومة مدينة باتو، وتنال منظومة المحاسبة المالية الدائرة قيمة $(t_{hitung}) < 6165$ $(t_{tabel}) < 1682$ تؤثر على جودة البيانات المالية الحكومة مدينة باتو. وفي نفس الوقت، يدل قيمة $(f_{hitung}) < 12085$ (f_{tabel}) أن كل المتغيرات تؤثر على جودة البيانات المالية الحكومة مدينة باتو. إذان، تستطيع ان تقول أن الثلاثة المتغيرات طبقت جيدة حتى تستطيع ان تصبح البيانات المالية الحكومة مدينة باتو أكثر الجودة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2000 memberikan dampak dari tuntutan masyarakat agar lebih meningkatkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa agar tercipta dan terselenggara pemerintahan yang baik dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Paradigma tersebut mewajibkan agar setiap satuan kerja perangkat daerah termasuk pemerintah untuk lebih mempertanggungjawabkan keuangan daerah serta mampu memberikan laporan informasi keuangan yang berkualitas secara transparan kepada publik. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat lebih berguna bagi para pengguna, stakeholder dan masyarakat jadi, dalam mewujudkan upaya tersebut pemerintah harus melakukan tindak perbaikan dalam laporan keuangan supaya laporan keuangan yang berkualitas.

Semua Entitas termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana laporan keuangan ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Publik (APBD) serta yang akan memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja entitas tersebut. Keuangan Daerah dalam PP Nomor 58 tahun 2005 merupakan hak dan kewajiban sebuah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang di dalamnya termasuk bentuk dan segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU

No 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dimiliki oleh daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan adanya keuangan daerah untuk pemerintah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat (Khusaini, 2018 : 2).

Fenomena yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pujanira, 2017) menyatakan bahwa telah terjadi Fenomena dalam laporan keuangan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 1- 2016 untuk pelaporan tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dalam LKPD 2015, tercatat hanya 58% atau 321 LKPD yang memperoleh opini WTP. Sementara itu, LKPD lainnya tercatat memperoleh opini lain seperti wajar dengan pengecualian (WDP), tidak menyatakan pendapat, dan tidak wajar (TW). Fenomena lain yang terjadi ialah dalam pengungkapan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan ada 10.198 temuan yang menimbulkan 15.568 permasalahan dari 51 persen dari permasalahan yang terjadi ialah termasuk dalam ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak tepat waktu (Pujanira, 2017).

Fenomena lain yang terjadi di beberapa pemerintah daerah yang ada di Indonesia masih ditemukan adanya kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas utama dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai jadi, permasalahan yang terjadi dimana staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang berkecimpung dalam penyusunan laporan keuangan masih kurang memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang akuntansi. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Mardiasmo (2002: 146), sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo (2006: 1) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, pembangunan, sistem pengawasan, dan pemeriksaan, serta sebagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang memberikan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Adapun komponen yang mendukung dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan Pengelolaan keuangan diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian dan kompeten serta penguasaan ilmu teknologi informasi

akuntansi. Dimana kompetensi ini dapat di miliki dari proses pembelajaran dan kegiatan individu yang memungkinkan diperoleh dari berbagai pengertian, kecakapan, keterampilan dan perilaku yang mereka miliki agar dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan keandalan dan keahlian yang memadai. (Hullah dkk. 2012).

Selain sumber daya manusia yang kompeten, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu prinsip akuntansi yang mendasari dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara yang memerintahkan supaya bentuk dan isi dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Adapun Sistem Keuangan Akuntansi Daerah juga merupakan serangkaian prosedur termasuk dalam komponen mengkualitaskan laporan keuangan mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumentasi sampai dengan laporan dihasilkan. Bastian (319: 2010).

Menurut penelitian dahulu Pujanira (2017) menyatakan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menyatakan Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan menurut widyatama (2017) kompetensi aparatur yang juga bisa disebut sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas alokasi dana desa. Dikarenakan Kendala yang dihadapi Aparatur Pemerintah Desa untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah minimnya pengetahuan aparatur pemerintah dalam mengelola dana desa, kurangnya pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam hal penyusunan laporan keuangan, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme, teknik sistem akuntansi serta standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh katin (2018) menunjukkan hasil bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota malang. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap. Selain itu, standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan

keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, pemahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pujanira (2017) menunjukkan hasil penelitian Sistem akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat dan akurat. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya dilakukan oleh wardani (2017) yang menyatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah masih lemah, sehingga tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kelemahan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah umumnya terjadi karena pejabat atau petugas yang tidak optimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, lemah dalam pengawasan dan pengendalian dan kurang koordinasi antar pejabat terkait.

Dengan adanya hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah dengan menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerinta dan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu. Selain itu, peneliti melakukan penelitian ini juga untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah kota batu. Letak Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Letak perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada indikator penelitian, dimana peneliti menggabungkan beberapa indikator penelitian terdahulu yang merupakan indikator yang cocok dalam penelitian ini dan objek penelitian, lokasi penelitian yang di pilih peneliti yaitu Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Pesanggarahan, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Fenomena yang terjadi di Pemerintah kota batu pada jumat, 25 mei 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur mengumumkan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai badan yang berkewajiban melakukan audit terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tentu pemberian opini tersebut didasarkan pada beberapa kriteria sebagai indikator penilaiannya.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kota Batu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,

kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Batu.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut:

1. Laba yang diperoleh Agropolitan Televisi dan PT Bumi Wisata Resource Tahun 2017 sebesar Rp361.390.940,00 belum disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
2. Realisasi belanja barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp207.455.856,00 tidak didukung dengan bukti sebenarnya.
3. Kekurangan volume Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan 12 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp652.316.769,71.

Dengan adanya hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai kualitas pelaporan keuangan pada instansi pemerintah dengan menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerinta dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Pemerintah Kota Batu kerana Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengumumkan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi terdapat fenomena ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam laporan keaungan pemerintah kota batu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota batu?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu?
3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota batu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu.

3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan peluang dalam menambah wawasan berpikir serta dapat memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah batu dengan memastikan dan memperbaiki kompetensi sumber daya manusia khususnya pegawai bidang keuangan instansi pemerintah daerah agar dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bermanfaat sesuai kebutuhan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang diteliti oleh pihak lain sebagai rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis, beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada Skpd Kabupaten Polewali Mandar” Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi dan memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, (4) Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern mampu memoderasi dan memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arif WidyatamaLola Novitadan Diarespati (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)” Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Putriasri Pujanira (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY” dengan metode kuantitatif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (3) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (4) Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Dzulfikar Ahli Fikri (2016) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang)”. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama secara parsial kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang. Kedua secara simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang.

Penelitian juga dilakukan oleh Wardani dan Deni Yuwilia (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Labuhanbatu)”. Metode yang digunakan yaitu, metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Pemanfaatan Teknologi Informasi

berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, tetapi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Katin Wilda Maysaroh (2018) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Sukoharjo)”. Metode yang digunakan yaitu, metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sementara Penerapan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Hardyansyah (2016)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi pada skpd kabupaten polewali mandar	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi dan memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, (4) Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern mampu memoderasi dan memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
2	FikriAhli Dzulfikar (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama secara parsial kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan

		Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang)		signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang. kedua secara simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang.
3	Widyatama, Novita & Diarespati (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Kuantitatif	Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.
4	Pujanira Putriasri (2017)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DYI.	Kuantitatif	Hasil penelitian: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (3) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

				Pemerintah Daerah, (4) Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.
5	Wardani & Yuwilia (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, tetapi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6	Katin wilda maysaroh (2018)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, penerapan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan

		standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Sukoharjo)		keuangan pemerintah daerah, sementara penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
--	--	---	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas peneliti , penelitian sekarang dimaksudkan untuk menguji Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu. Letak Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Letak perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada indikator penelitian, dimana peneliti menggabungkan beberapa indikator penelitian terdahulu yang merupakan indikator yang cocok dalam penelitian ini dan objek penelitian, lokasi penelitian yang di pilih peneliti yaitu Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Pesanggarahan, Kecamatan Batu, Kota Batu.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan sebuah terminologi yang tidak asing didengar dan diucapkan oleh banyak orang. Terminologi dalam berbagai penggunaan, khususnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu kompetensi yang dapat juga dikatakan sebagai suatu kemampuan atau kecakapan serta keterampilan yang melekat pada sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas (Darmadi, 2018 : 42). Kompetensi juga merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Dengan mengevaluasi kompetensi yang dimiliki seseorang, kita akan dapat memprediksikan kinerja orang tersebut. Karyawan yang ditempatkan pada tugas tertentu yang telah dinilai akan mengetahui kompetensi apa saja yang diperlukan, serta cara apa yang harus ditempuh untuk mencapai promosi ke jenjang posisi berikutnya.

Mc.Lelland dalam Moehariono (2012) kompetensi merupakan karakteristik dasar personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada situasi tertentu. Adapun komponen yang membentuk suatu kompetensi menurut Abdullah (2013) adalah pengetahuan, keterampilan, konsep diri, ciri diri dan motif.

Kompetensi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Keyakinan dan nilai-nilai Keterampilan
2. Pengalaman
3. Karakteristik Kepribadian
4. Motivasi
5. Emosional
6. Intelektual
7. Budaya Organisasi

Sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu elemen penting dan juga Sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap efektivitas organisasi dibanding dengan sumber daya yang lain. Seberapa baik sumber daya manusia dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang. Pengeioloan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen Organisasi. Menurut Mardiasmo (2002: 146), sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik maka efektivitas tidak akan tercapai. Kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini sesuai dengan

perkembangan dan kemajuan yang berlangsung saat ini. Faktor lingkungan, perubahan teknologi yang cepat, kompetisi internasional dan kondisi perekonomian yang tidak menentu (Purnaya, 2016 : 3). Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuannya benar benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu (Fathoni, 2006 : 21).

Berdasarkan penjelasan dan pengertian diatas menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia agar dapat dimanfaatkan dan dipratikkan untuk efektivitas dan pencapaian yang akan dicapai dalam suatu kelompok atau organisasi.

2.2.2 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan, disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

1. SAP Berbasis Akruwal

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akruwal, yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akruwal tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain :

- a. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.

- b. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya.
- c. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
- d. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.
- f. Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya atau melakukan bisnis dengan entitas.
- g. Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

2. SAP Berbasis Kas Menuju Akrua

SAP Berbasis Kas Menuju Akrua dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrua tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014. Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Tujuan
Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan

keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

2. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
 - b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan

informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
 - b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
 - c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah.
4. PSAP Nomor 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai

potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

5. PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:
 - a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan.
 - b. Instrumen keuangan.
6. PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi

jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- a. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas
 - b. Investasi dalam perusahaan asosiasi
 - c. Kerjasama operasi
 - d. Investasi dalam properti.
7. PSAP Nomor 07 Tentang Aktiva Tetap Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:

- a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources)
- b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non regenerative natural resources*).

Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang telah dijelaskan di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

8. PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi dalam Pengerjaan Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

9. PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Pernyataan Standar ini mengatur:

- a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

- b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
- c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.
- d. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- a. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.
 - b. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai
 - c. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.
10. PSAP Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam

menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah pusat atau daerah.

11. PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional Tujuan pernyataan

standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam entitas pelaporan.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, suatu laporan keuangan itu baik apabila dihasilkan dari penerapan SAP dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

2.2.3 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Abdul Halim (2007:43) definisi dari akuntansi keuangan daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan

daerah adalah Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 70 ayat 1, yaitu Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

2. Penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah.
3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawasan Keuangan, Investor, Kreditor, dan Donatur, Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, pemerintah Daerah lain, dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Berkaitan dengan laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Setiap

proses akuntansi yang terjadi di lingkungan satuan kerja akan tercermin dalam laporan keuangan.

2.2.4 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut Afiyah (2010: 164), Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengidentifikasian dokumen, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun. Menurut Bastian (2010: 96), laporan keuangan merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tujuan sebuah pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah dan menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk

operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Hery (2012 : 3), mengartikan laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitasnya perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan alat yang menghubungkan perusahaan atau pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan maupun pemerintahan dan kinerja perusahaan ataupun pemerintah daerah. Sedangkan, menurut Yadiati (2017: 32) Kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan juga dapat ditentukan oleh faktor kepemimpinan karena gaya kepemimpinan yang diterapkan akan mempengaruhi kinerja bawahannya. Pemimpin yang baik

sebenarnya pemimpin yang mau berkorban dan peduli untuk orang lain serta bersifat melayani. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk tujuan tertentu (Heidjracman, 2002: 224).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP Tahun 2010 menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut antara lain :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengguna.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika

hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal yang dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pengelolaan kadang diartikan sama dengan manajemen. Islam adalah agama yang sempurna dimana setiap aspek kehidupan manusia diatur di dalam Alquran. Bahkan termasuk pula mengenai keuangan. Islam juga

mengatur tentang prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai dengan hukum Allah. Kaidah-kaidah Akuntansi dalam Islam, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Sistem ekonomi Islam, pemasukan dan pengeluaran uang negara ada kekhususan yang tidak ada dalam sistem konvensional terutama pada sistem pengeluaran. Dalam pengeluaran ada yang terikat dengan sumber penerimaan, dan ada yang tidak terikat. Jenis pertama, dalam istilah al-Māwardī harta yang masuk kedalam kas negara sebagai amanah, maka pemerintah hanya diberi kewenangan untuk mendistribusikannya kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syara', seperti sudah disebutkan dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' ayat 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam Hadist Rasulullah bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت أمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها أي رسول الله ؟ قال إذا أسند المرء غريمه أهله فانتظر الساعة.

Artinya: Rasulullah saw., bersabda: apabila amanah telah dicabut maka tunggulah kehancuran (kiamat), Abu Hurairah bertanya bagaimana dicabutnya amanah ya Rasulullah? Nabi menjawab: apabila sesuatu telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran.

Tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu dan kebutuhan sekunder masyarakat, pemerintah diberikan amanah untuk mengelolah keuangan publik. Menurut Mardiasmo (2009:33) menyatakan bahwa Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Amanah itu adalah setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang dan ia diperintahkan untuk menunaikannya, Allah memerintahkan hamba-hambanya agar menunaikan amanah, maksudnya secara sempurna dan penuh, tidak dikurangi, dicurangi, dan tidak pula dilur-ulur, dan termasuk dalam amanah di sini adalah amanah kekuasaan, harta, rahasia-rahasia, dan perintah-perintah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah semata.

2.3 Kerangka Konseptual

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal pariwisatanya, baik wisata alam maupun wisata buatan. Dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu sudah membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya pengembangan pariwisata. Dalam implementasi

kebijakan-kebijakan tersebut dikatakan sudah berhasil, dilihat dari indikator implementasi kebijakan dari Model Edward III, yaitu komunikasi, resources, disposition, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Batu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu pro ekonomi kesejahteraan, pro lingkungan berkelanjutan, pro keadilan sosial, dan pro lingkungan hidup.

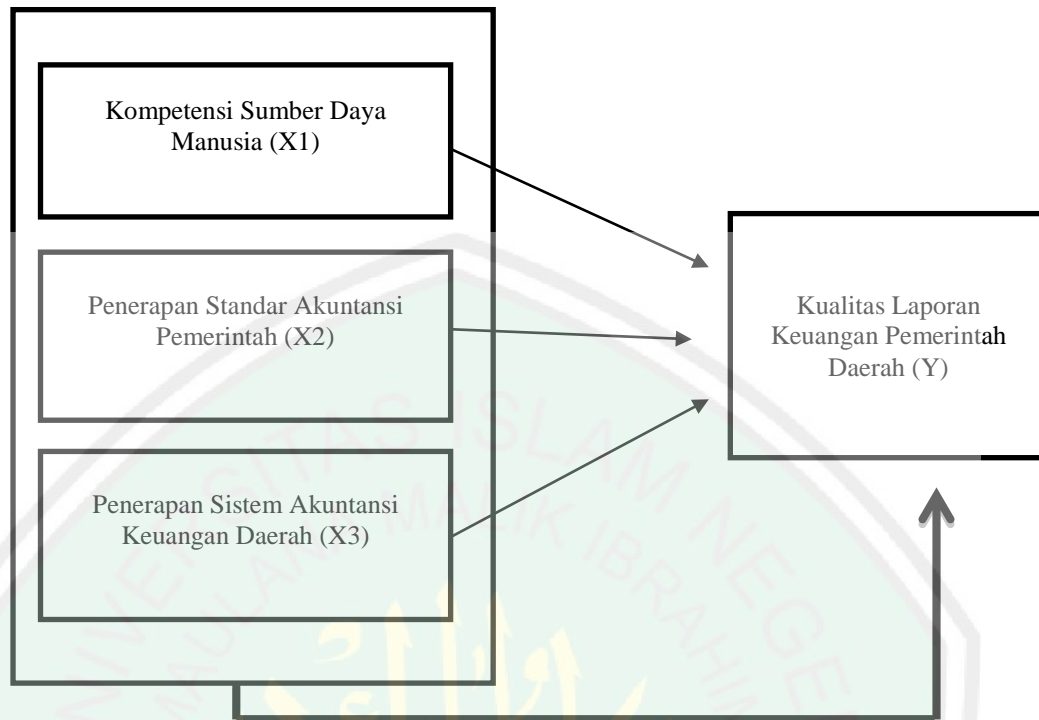
Keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata Kota Batu berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan, tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Batu. Adapun peran Pemerintah Kota Batu dalam mensukseskan kebijakan tersebut adalah pembuat kebijakan (Policy) secara umum dan regulasi perizinan serta kebijakan yang memihak pada masyarakat dan mengontrol pihak-pihak swasta yang berinvestasi di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu, sebagai bagian dari instansi pemerintahan Indonesia mulai melaksanakan perbaikan terhadap kinerja pemerintahannya sejalan dengan program reformasi birokrasi pemerintah, yaitu menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif dan produktif.

Sejalan dengan otonomi pemerintahan daerah tuntutan masyarakat kepada pemerintahan daerah semakin meningkat. Pemerintahan harus dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah harus menyediakan informasi bagi penyediadana dan pemakai lain. Guna memenuhi tanggung jawab ini dibutuhkan sumber daya manusia dalam penyusunannya. Sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir sehingga akan

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengelola dan melaporkan penggunaan dana yang telah dilakukan secara sistematis pada suatu periode pelaporan.

Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam bidang akuntansi keuangan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga penting dilakukan dalam menyusun laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman yang berlaku dalam rangka menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemerintah juga harus menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut secara baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga laporan keuangan menjadi berkualitas. Pemerintah juga mengharapkan bagaimana proses akuntansi itu dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan sistematis sistem akuntansi keuangan daerah sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan landasan teori yang telah di paparkan di atas, maka penulis menggambarkan dalam kerangka konseptual yang disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

→ = Pengaruh parsial (untuk masing-masing variabel X terhadap variabel Y).

→ = Pengaruh simultan (untuk semua variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y).

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 96) Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Menurut Bambang Supomo (1999: 69) Hipotesis nol (H_0) merupakan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan antar variabel yang definitif atau eksak sama dengan nol, secara umum dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atau signifikan antar variabel yang diteliti. Sedangkan, Hipotesis alternatif (H_a)

merupakan lawan pernyataan dari format hipotesis nol yang menunjukkan adanya hubungan atau signifikan antar variabel peneliti.

Untuk hipotesis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu secara persial, sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya manusia (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Mc.Lelland dalam Moeheriono (2012) kompetensi merupakan karakteristik dasar personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada situasi tertentu. Sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu elemen penting dan juga Sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian widyatama (2017) kompetensi aparatur yang juga bisa disebut sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas alokasi dana desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pujanira (2017) menyatakan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H_{01} = Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Y).

H_{a1} = Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan, disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh katin (2018) menunjukkan hasil bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota malang. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dilajukan adalah :

H_{a2} = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Y2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah(Y).

3. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y).

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah adalah Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya dilakukan oleh wardani (2017) yang menyatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pujanira (2017) menunjukkan hasil penelitian Sistem akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dilajukan :

H_{03} = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

H_{a3} = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Melihat dari pada rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang berbentuk angka, atau data yang diubah menjadi sebuah angka (Sugiyono, 2012: 23).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur. Alasan dipilihnya tempat penelitian ini dikarenakan Pemerintah Kota Batu merupakan sebuah instansi pemerintah daerah yang dapat diteliti kualitas laporan keuangannya. Responden penelitian ini yaitu pegawai bagian keuangan pada SKPD pemerintahan kota batu.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian Sugiyono (2011:80) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari, kemudian di ambil kesimpulannya. Populasi bukan hanya berdasarkan orang saja akan tetapi juga berupa objek atau benda-benda alam lainnya.

Maka dari itu peneliti menentukan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan keuangan (bendahara) yang terdapat di SKPD yang berada di pemerintahan kota batu. Adapun karyawan keuangan SKPD Pemerintah Kota

Batu terdiri dari 45 karyawan bendahara pengeluaran dan penerimaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Karyawan keuangan SKPD Pemerintah Kota Batu

No	SKPD	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	Bagian Hukum	Bendahara Pengeluaran
2	Bagian Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah	Bendahara Pengeluaran
3	Bagian Organisasi	Bendahara Pengeluaran
4	Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Bendahara Pengeluaran
5	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	Bendahara Pengeluaran
6	Bagian Layanan Pengadaan	Bendahara Pengeluaran
7	Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran
8	Bagian Hubungan Masyarakat	Bendahara Pengeluaran
9	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bendahara Pengeluaran
10	Sekretariat DPRD	Bendahara Pengeluaran
11	Inspektorat	Bendahara Pengeluaran
12	Dinas Pendidikan	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran
14	Dinas Pariwisata	Bendahara Pengeluaran
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara Pengeluaran
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bendahara Pengeluaran
18	Dinas Kesehatan	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
19	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Bendahara Pengeluaran
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
21	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran
22	Dinas Kependudukan dan	Bendahara Pengeluaran

	Pencacatan Sipil	
23	Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran
24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
25	Dinas Pertanian	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
26	Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran
27	Dinas Ketahanan Pangan	Bendahara Pengeluaran
28	Dinas Penanggulangan Kebakaran	Bendahara Pengeluaran
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran
31	Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah	Bendahara Pengeluaran
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bendahara Pengeluaran
33	Badan Keuangan Daerah	Bendahara Penerimaan SKPD Bendahara Pengeluaran SKPD
34	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran
35	Kecamatan Batu	Bendahara Pengeluaran
36	Kecamatan Junrejo	Bendahara Pengeluaran
37	Kecamatan Bumiaji	Bendahara Pengeluaran

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu adalah teknik dalam pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota.

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode Sampling jenuh berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2001: 78), yang mengatakan bahwa: “Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh. Metode sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Jadi seluruh karyawan bagian keuangan yang berada di seluruh SKPD Pemerintah Kota Batu memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara serta kuisisioner pada objek penelitian yang dituju. Sumber data penelitian ini yaitu total skor yang didapat dari hasil pengisian kuisisioner yang telah dikirim ke seluruh pegawai bagian keuangan di pemerintahan kota batu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data yang berdasarkan angka-angka dan menunjukkan nilai terhadap variabel yang diwakilinya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti meninjau objek yang diteliti dengan cara mengirim kuisisioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner. Menurut sugiyono (2005 : 162), kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien agar peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari Responden.

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2012 : 59). Berdasarkan judul dan penjelasan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat empat variabel. Adapun variabel dalam penelitian ini seperti yang dipaparkan menurut Sugiyono (2010 : 30) dalam bukunya, yaitu:

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3).

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan menjadi variabel terikat (dependent variable) adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Y).

Tabel 3.2 Definisi operasional variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) (Pujanira (2017), Adhitama (2017) dan Hardyansyah (2016).	1. Relevan	<ol style="list-style-type: none"> Laporan keuangan memiliki informasi yang dapat mengoreksi kesalahan di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang diperoleh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan memenuhi kebutuhan pemakai.
	2. Andal	<ol style="list-style-type: none"> Terhindar dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dari semua transaksi dan peristiwa keuangan yang seharusnya disajikan. informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
	3. Dapat dipahami	<ol style="list-style-type: none"> Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas oleh pengguna.
	4. Dapat dibandingkan	<ol style="list-style-type: none"> Informasi yang terdapat di Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan

<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) Pujanira (2017) dan Wardani (2017)</p>	<p>1. Pengetahuan</p>	<p>laporan keuangan periode sebelumnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan keuangan memahami tugas dalam melaksanakan fungsi akuntansi. 2. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi merupakan proses pengindetifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu entitas atau organisasi. 3. Memahami Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik.
	<p>2. Keterampilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya selaku pegawai bagian keuangan membuat jurnal setiap transaksi. 2. Saya selaku pegawai bagian keuangan dapat memposting jurnal ke buku besar 3. Saya selaku pegawai bagian keuangan menyusun dan menyajikan neraca dengan baik. 4. Saya selaku pegawai bagian keuangan dapat menyusun dan menyajikan laporan arus kas. 5. Saya selaku pegawai bagian keuangan dapat menyajikan Catatan atas laporan

		<p>keuangan secara rinci dan terdapat pemahaman di setiap pos-pos yang ada.</p> <p>6. Saya selaku pegawai bagian keuangan berpartisipasi dalam pelatihan yang terkait dengan penatausahaan laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
	3. Perilaku	<p>1. Saya selaku pegawai bagian keuangan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.</p> <p>2. Saya selaku pegawai bagian keuangan mematuhi kewajiban sebagai pegawai dengan baik.</p>
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) (Pujanira 2017) dan (Kusumo 2018)	1. PSAP No 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan	<p>1. Pada instansi tempat saya bekerja penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.</p> <p>2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah.</p> <p>3. Instansi tempat saya bekerja telah menerapkan basis akrual untuk mengakui aset.</p> <p>4. Instansi tempat saya bekerja telah menerapkan basis</p>

		akrual untuk mengakui kewajiban.
	2. PSAP No. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada instansi tempat saya bekerja telah mencatat pendapatan sesuai asas bruto. 2. Pada instansi tempat saya bekerja saat ada pengeluaran dari rekening kas mengakuinya sebagai belanja. 3. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di rekening kas.
	3. PSAP No. 3 Tentang Laporan Arus Kas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada instansi tempat Saya bekerja telah menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. 2. Pada instansi ini telah menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas operasi.
	4. PSAP No. 4 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada instansi ini telah menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan. 2. Catatan atas laporan keuangan meliputi pemaparan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan.
	5. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada instansi tempat Saya bekerja, telah mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah. 2. Pencatatan

		<p>persediaan telah dilaksanakan berdasarkan inventarisasi fisik.</p>
	<p>6. PSAP No. 6 Tentang Akuntansi Investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Instansi ini telah mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur. 2. Pada instansi tempat saya bekerja telah mencatat investasi sebesar biaya perolehan untuk kepemilikan permanen. 3. Telah menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan untuk penilaian investasi atas kepemilikan non-permanen pada instansi tempat saya
	<p>7. PSAP No. 7 Tentang Aset Tetap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas pada tempat saya bekerja. 2. Mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan.
	<p>8. PSAP No. 8 Tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi ini telah mengungkapkan informasi kontruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi. 2. Pada instansi ini, jika pekerjaankontruksi

		telah selesai maka memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap.
	9. PSAP No. 9 Tentang Akuntansi Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi ini mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan pada saat kewajiban timbul. 2. Pada instansi ini, telah mencatat kewajiban sesuai dengan nilai nominal.
	10. PSAP No. 10 Tentang Koreksi Kesalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi merupakan tindakan pembenaran agar pos-pos yang tersedia sesuai dengan yang seharusnya. 2. Instansi ini melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan.
	11. PSAP No. 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi ini dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasi. 2. Laporan keuangan konsolidasi yang dibuat oleh instansi ini, telah mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.
	12. PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi ini menyusun laporan operasional pada periode akuntansi. 2. Telah dibuat laporan operasional yang mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

<p>Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) (Pujanira 2017) dan (Kusumo 2018)</p>	<p>1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p>	<p>1. Penerapan Sistem akuntansi yang diterapkan pada instansi ini telah sesuai SAP. 2. Basis akuntansi penyusun laporan keuangan berbasis akrual. 3. Pada instansi ini telah melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi.</p>
	<p>2. Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang berlaku Umum</p>	<p>1. Sistem akuntansi keuangan daerah sekurang-kurangnya memuat 4 prosedur. 2. Instansi ini melakukan prosedur penerimaan kas sesuai dengan sistem akuntansi. 3. Instansi ini melaksanakan prosedur pengeluaran kas sesuai dengan sistem akuntansi. 4. Instansi ini melakukan prosedur akuntansi selain kas (akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi kewajiban, akuntansi investasi, dan akuntansi ekuitas) 5. Melakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan yang terjadi di instansi ini. 6. Pencatatan transaksi</p>

		<p>keuangan dilakukan secara kronologis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Setiap pencatatan transaksi yang ada disertai oleh bukti transaksi 8. Instansi ini melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang telah terjadi. 9. Dokumen pencatatan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu. 10. Instansi ini melakukan kalsifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos yang seharusnya.
	<p>3. Pembutan Laporan Keuangan Secara Periodik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi ini dilakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan. 2. Laporan keuangan pada instansi ini dibuat setiap periode akuntansi. 3. Unsur yang terdapat dalam LRA adalah pendapatan LRA, Belanja dan pembiayaan. 4. Dalam laporan operasional terdapat unsur pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. 5. Dalam laporan neraca terdapat unsur asset, kewajiban, dan ekuitas. 6. Dalam laporan arus

		<p>kas terdapat unsur arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi.</p> <p>7. Pada instansi instansi ini pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.</p>
--	--	---

Dalam mengukur sub- sub variabel maka peneliti menggunakan tehnik Skala *Likert*, yang mana sub variabel yang akan di ukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang nantinya akan dijadikan titik tolak untuk penyusunan item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *Likert* .Skala *Likert* berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, dan pengetahuanseseorang atau kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008: 93).Fenomena sosial dalam penelitian ini adalah variabel penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Skala *likert* yang digunakan merupakan skala likert berdimensi 4, dan ukuran yang digunakan dalam menilai jawaban-jawaban menguji variabel independen yaitu rentang nilai 1-4.Untuk pertanyaan positif alternatif jawaban (1-4) dan pernyataan negatif alternatif jawaban (1-4).

Skor Skala *Likert* dalam Pernyataan Positif :

- Skor 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
- Skor 3 untuk jawaban Setuju (S)
- Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)
- Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor Skala *Likert* dalam Pernyataan Negatif :

- Skor 1 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
- Skor 2 untuk jawaban Setuju (S)
- Skor 3 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)
- Skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS).

3.8 Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk mendapatkan informasi dan hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis data dengan menggunakan:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data kemudian menyajikannya dalam bentuk yang benar. (Ghozi, 2015 : 2). Adapun fungsi analisis statistik deskriptif menurut (Sugiyono, 2012 : 29) yaitu untuk memberikan gambaran atas objek yang diteliti melalui data populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku. Dalam penelitian ini teknik analisis data dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan dilihat dari nilai rata-rata (mean), atau nilai maksimal dengan nilai tertinggi dari sebuah data, nilai minimum dengan nilai terendah dari sebuah data, atau standar deviasi (Ghazali, 2016, 19).

3.8.2 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu uji yang menunjukkan tingkat kevalidan alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa baik instrumen dalam mengukur konsep yang ingin diukur (Sekaran, 2011). Uji validitas dalam penelitian ini alat ukurnya berupa kuisisioner tentang variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sistem akuntansi keuangan Daerah dan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari adanya uji validitas yaitu untuk mengukur valid atau tidaknya kuisisioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS.

3.8.3 Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana data dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama. Dan menurut (Ghozali, 2011: 48) menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Dengan demikian apabila semua variabel menunjukkan mempunyai *Cronbach Alfa* lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dikatakan handal.

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel panggung atau residual memiliki distribusi normal.

Dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis.

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sistem akuntansi keuangan Daerah dan variabel kualitas laporan keuangan daerah. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinieritas dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen yaitu dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor* (VIF).

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Tujuan dari adanya pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah pada model regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukkan dengan titik-titik tersebut membentuk

suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dimana analisis ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat adanya suatu hubungan dan pengaruh antara variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia (X_1), penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X_2), sistem akuntansi keuangan Daerah (X_3) dan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (y). Adapun persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

Y = Variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

X_1 = Variabel independen kompetensi sumber daya manusia

X_2 = Variabel independen penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

X_3 = Variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah

e = Standar error

Sebelum diperoleh suatu kesimpulan dari analisis ini terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis secara menyeluruh yaitu persial (uji t) dan simultan (uji F) adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, seperti yang telah dijelaskan di kerangka konseptual. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran yang diperoleh signifikan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel terikat secara parsial atau masing-masing. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent.

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan dengan tujuan mengetahui apakah variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau signifikan α sebesar $5\% = 0,05$. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independent terhadap variabel dependent. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan

secara bersama-sama antara variabel independent terhadap variabel dependent.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Batu

Kota batu adalah kota yang terdapat di Jawa Timur yang biasanya orang kenal dengan sebutan kota wisata karena kota tersebut memiliki alam pegunungan yang masih sejuk dan asri dalam tingkat regional ataupun internasional. Kota Batu sudah terkenal sejak abad ke IX akhir Masehi, sebagai Kota Wisata karena keindahan pemandangan alamnya. Kota yang terletak sekitar 19 km sebelah barat Kota Malang dan memakan waktu kurang lebih 2 jam dari Kota Surabaya ini memiliki ketinggian antara 680 m sampai 1700 m di atas permukaan air laut serta suhu udara berkisar antara 15° sampai dengan 19° Celcius. Udara segar dan sejuk dan dikelilingi bukit-bukit indah menjadi daya tarik tersendiri jika dibanding kota-kota lain di Indonesia. Kota Batu yang pernah dijuluki De Kleine Switzerland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa mempunyai banyak potensi wisata menawan, antara lain Lembah Songgoriti, Pasar Malam, Wisata Wana, Selecta, Wisata Desa, Jawa Timur Park, Wisata Bangunan Kuno, Wisata Agro dan wisata lainnya.

Pada tanggal 6 Maret 1993 Kota administrasi Batu dibentuk dan diresmikan pada tanggal 10 April 1995 Surat persetujuan DPRD Kab. Malang dan Walikota Malang tentang peningkatan status kota administratif Batu menjadi pemerintah kota Batu, Sebelum menjadi sebuah

pemerintahan kota, kota batu termasuk dalam bagiankecamatan wilayah Kabupaten Malang dan pada tahun 1993 ditetapkan sebagai Kota Administratif (Kotatif). Setiap tahunnya kotatif kota batu semakin maju dan meningkat sehingga menjadikannya seperti daerah perkotaan. Pesatnya perkembangan yang terjadi membuat bupati malang bapak Abdul Hamid bergagasan agar meningkatkan kotatif batu menjadi sebuah Pemerintah Kota. Pada tahun 2001 akhirnya dikeluarkannya UU Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Batu dalam pembentukan pemerintah kota batu ini memunculkan beberapa perubahan yang berbeda pada saat masih dalam satu naungan wilayah kabupaten kota malang dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat yaitu aspek politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban.

4.1.2 Gambaran Umum Pemerintah Kota Batu

Pemerintahan kota batu sama halnya dengan pemerintahan yang lainnya yaitu dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh anggota DPRD kota yang pada saat ini dipimpin oleh Dra. Hj Dewanti Rumpoko, M.SI dan diwakili oleh Ir. Hj Punjul Santoso, S.H., M.M. kecamatan yang ada di pemerintah kota batu dipimpin oleh seorang camat yang dibagi menjadi desa dan kelurahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan lurah. Dalam melaksanakan fungsi eksekutif agar terkoordinir dan penyelenggaraanya berjalan dengan baik pemerintah kota batu menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari banyak pihak didalamnya.

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota batu yaitu:

1. Bagian Hukum
2. Bagian Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah
3. Bagian Organisasi
4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
6. Bagian Layanan Pengadaan
7. Bagian Umum
8. Bagian Hubungan Masyarakat
9. Bagian Protokol dan Rumah Tangga
10. Sekretariat DPRD
11. Inspektorat
12. Dinas Pendidikan
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Dinas Pariwisata
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Kesehatan
19. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

20. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan
21. Dinas Lingkungan Hidup
22. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
25. Dinas Pertanian
26. Dinas Sosial
27. Dinas Ketahanan Pangan
28. Dinas Penanggulangan Kebakaran
29. Badan Penaggulan Bencana Daerah
30. Satuan Polisi Pamong Praja
31. Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah
32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33. Badan Keuangan Daerah
34. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
35. Kecamatan Junrejo
36. Kecamatan Bumiaji

4.1.3 Visi dan Misi Pemerintah Kota Batu

a. Visi Pemerintah Kota Batu

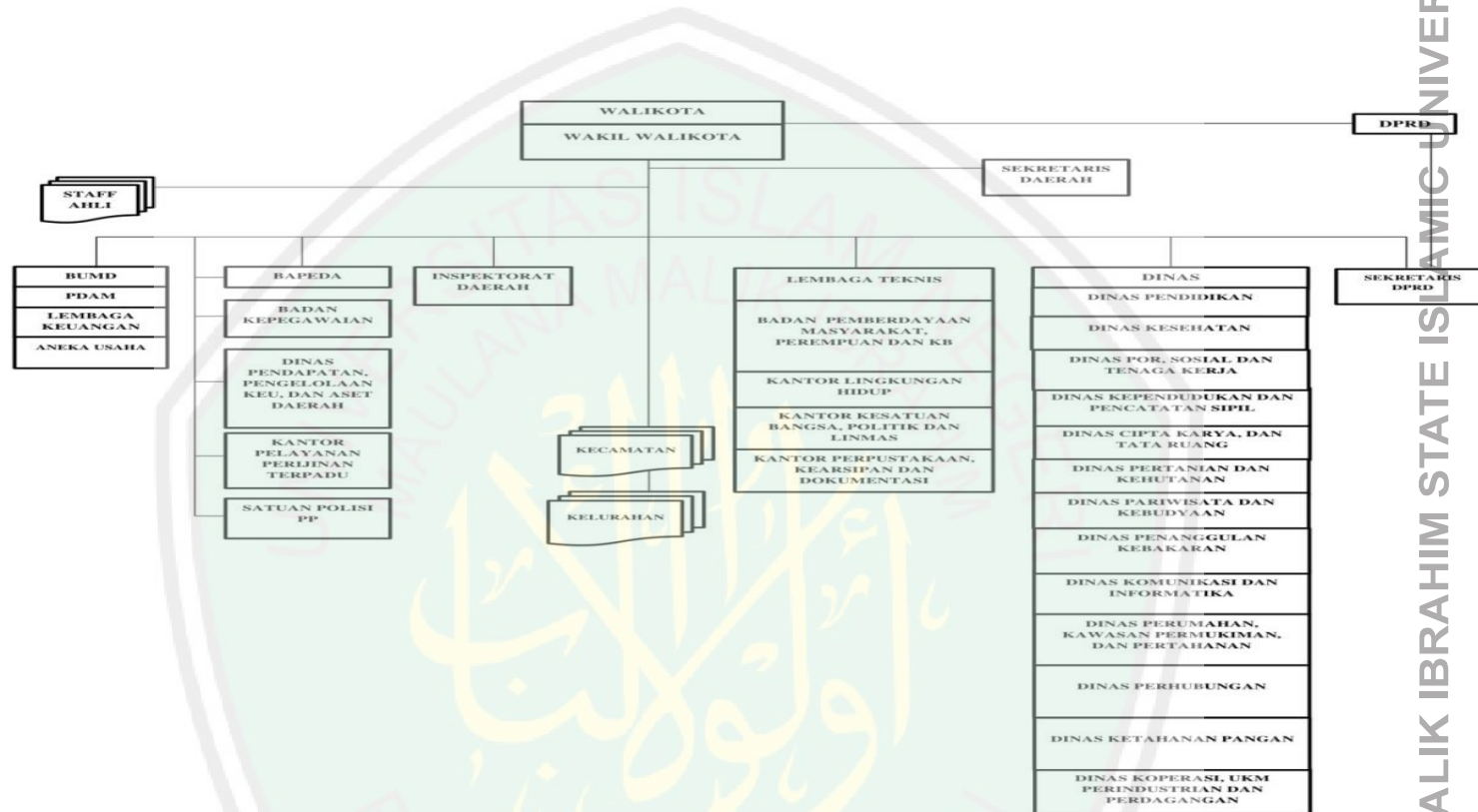
Desa Berdaya Kota Berjaya terwujudnya kota batu sebagai sentra agro wisata internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera.

b. Misi Pemerintah Kota Batu

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal.
2. Meningkatkan pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia.
3. Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu gambaran skematis mengenai hubungan kerjasama dari masing-masing kelompok pegawai untuk mencapai suatu tujuan.



Gambar 4.1

Struktur Organaisasi Pemerintah Kota Batu

Struktur Organisasi merupakan suatu gambaran skematis mengenai hubungan kerjasama dari masing-masing pekerja untuk mencapai suatu tujuan. Pemerintah kota batu dipimpin oleh seorang walikota yang dibantu oleh beberapa bagian di dalamnya diantaranya:

1. Walikota adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota. Walikota mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kota.
2. Wakil Walikota mempunyai tugas membantu walikota dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan bupati.
4. Sekretaris Daerah
Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif.
5. Staf Ahli

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya. dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli. Staf ahli terdiri dari:

- Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan.

- Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Kemasyarakatan.
6. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan badan usaha yang dikelola, diawasi oleh pemerintah daerah dimana sebagian besar pendapatan diperoleh dari negara yang didapat dari pendapatan daerah.
 7. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) merupakan unit usaha milik daerah yang beroperasi dalam distribusi air bersih untuk masyarakat umum.
 8. Lembaga Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membantu pemerintah dalam urusan dalam bidang keuangan pemerintah.
 9. Aneka Usaha mempunyai tugas melakukan urusan usaha pemerintahan.
 10. BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan.
 11. Badan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
 12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah melaksanakan fungsi dalam penunjang keuangan.

13. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan.
14. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
15. Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah.
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.
17. Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup.
18. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
19. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
20. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan serta urusan pemerintah bidang kepemudaan.
21. Dinas Kesehatan menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang kesehatan.
22. Dinas POR, Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan tugas pemerintah bidang tenaga kerja.
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

24. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan tugas pemerintah bidang cipta karya dan tata ruang.
25. Dinas Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian serta urusan pemerintahan bidang kehutanan dan kelautan.
26. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata serta urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
27. Dinas Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam urusan kebakaran.
28. Dinas Komunikasi dan informatika menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintah bidang persandian.
29. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
30. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan.
31. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pangan.

32. Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, UKM perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan.

4.1.5 Karakteristik Responden

Penelitian ini dalam penelitiannya memilih responden seluruh SKPD Pemerintah kota batu bagian karyawan keuangan (bendahara). Sampel yang digunakan berjumlah 45 pegawai bendahara penerimaan dan pengeluaran dari 37 SKPD Pemerintah Kota Batu. Kuesioner yang disebar berjumlah 45 kuesioner dan yang diisi berjumlah 45 kuesioner.

Tabel 4.1

Jumlah kuesioner yang disebar

Jumlah kuesioner yang disebar	45 kuesioner
Jumlah kuesioner yang kembali	45 kuesioner
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	45 kuesioner

Sumber data diolah peneliti (2019)

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 karakteristik yaitu: jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama bekerja.

1. Karakteristik responden menurut jenis kelamin

Berikut adalah data penelitian yang menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2**Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis kelamin	Responden	Persentase (%)
1	Pria	13	28%
2	Wanita	32	72%
Total		45	100%

Sumber data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 yang terdapat diatas karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak dilihat dari jenis kelamin yaitu perempuan dengan presentase sebesar 72% dan responden pria sebesar 28%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut adalah data penelitian yang menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia.

Tabel 4.3**Karakteristik Responden berdasarkan usia**

No	Usia	Jumlah Karyawan	Persentase (%)
1	<20	0	0%
2	20-30	5	11%
3	31-40	25	56%
4	41-50	15	33%
5	>50	0	0%
Total		45	100%

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 yang tercantum diatas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia <20 tahun hasilnya nihil atau tidak ada (0%), responden dengan usia 20-30 tahun berjumlah 5 dengan presentase 11%, responden dengan usia 31-40 tahun berjumlah 25 dengan presentase 56%, responden dengan usia 41-50 tahun berjumlah 15 dengan presentase 33% dan responden dengan usia >50 tahun hasilnya nihil atau tidak ada (0%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik usia terbanyak adalah 31-40 tahun dengan jumlah 25.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut data penelitian yang menunjukkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah karyawan	Presentase(%)
1	SMA	5	11%
2	DIPLOMA	3	6%
3	S1	25	56%
4	S2	9	21%
5	Lainnya	3	6%
Total		45	100%

Sumber data diolah peneliti (2019)

Sesuai data yang telah dijabarkan tabel diatas, responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 5 dengan presentase 11%,

responden dengan tingkat pendidikan DIPLOMA berjumlah 3 dengan presentase 6%, responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 25 dengan presentase 56%, responden dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 9 dengan presentase 21% sedangkan responden dengan tingkat pendidikan lainnya berjumlah 3 dengan presentase 6%. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan S1 adalah paling banyak diantara seluruhnya.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berikut merupakan data penelitian yang menunjukkan karakteristik responden berdasarkan lama bekerja.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah Karyawan	Presentase (%)
1	1-5 tahun	5	11%
2	6-10 tahun	23	52%
3	>10 tahun	17	37%
Total		45%	100%

Sumber data diolah peneliti (2019)

Menurut data yang telah dijabarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden dengan karakteristik responden berdasarkan lama bekerja 1-5 tahun berjumlah 5 karyawan dengan presentase 11%, responden dengan lama bekerja 6-10 tahun berjumlah 23 karyawan dengan presentase 52% dan >10 tahun berjumlah 17

karyawan dengan presentase 37%. Responden dengan karakteristik berdasarkan lama bekerja 6-10 tahun adalah karyawan paling banyak lama bekerja.

4.1.6 Uji Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini di deskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif dimana analisis ini meliputi jumlah penelitian, nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 4.6
Statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM (X1)	45	25.00	41.00	33.9556	3.23304
Penerapan SAD (X2)	45	74.00	109.00	90.3778	8.24701
Sistem AKD (X3)	45	57.00	80.00	64.9333	6.77026
Kualitas LKP (Y)	45	24.00	32.00	26.7556	2.70652
Valid N (listwise)	45				

Sumber data diolah peneliti (2019)

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel independen Kompetensi sumber daya manusia yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 45 responden. Dan dari 45 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 25.00, nilai maksimum sebesar 41.00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 33.95 dan nilai standar deviasi sebesar 3.23.

Hasil uji statistik deskriptif variabel independen Penerapan standar akuntansi pemerintah yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 45 responden. Dari 45 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 74.00, nilai maksimum sebesar 109, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 90.37 dan nilai standar deviasi sebesar 8.24.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel independen Sistem akuntansi keuangan daerah yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 45 responden. Dari 45 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 57.00, nilai maksimum sebesar 80.00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 64.93 dan nilai standar deviasi sebesar 6.77.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel dependen Kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 45 responden dan variabel ini menggunakan indikator relevan, andal, apat dipahami, dan dapat dibandingkan yang diuraikan dalam 8 pertanyaan. Jadi dari 45 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 24.00, nilai maksimum sebesar 32.00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26.75 dan nilai standar deviasi sebesar 2.70.

4.1.7 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel. Dalam uji validitas, kuisisioner

dapat dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sebaliknya apabila nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan tersebut tidak valid. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuisioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Uji Validitas

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Indikator	Validitas	
	Pearson Correlation	Kesimpulan
X1.1	0,615	Valid
X1.2	0,500	Valid
X1.3	0,737	Valid
X1.4	0,735	Valid
X1.5	0,724	Valid
X1.6	0,710	Valid
X1.7	0,745	Valid
X1.8	0,410	Valid
X1.9	0,648	Valid
X1.10	0,334	Valid
X1.11	0,396	Valid

Sumber data diolah peneliti (2019)

Tabel 4.8
Uji Validitas

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Daerah (X2)

Indikator	Validitas	
	Pearson Correlation	Kesimpulan
X2.1	0,562	Valid
X2.2	0,610	Valid
X2.3	0,654	Valid
X2.4	0,648	Valid
X2.5	0,372	Valid
X2.6	0,448	Valid
X2.7	0,321	Valid
X2.8	0,665	Valid
X2.9	0,539	Valid
X2.10	0,360	Valid
X2.11	0,715	Valid
X2.12	0,619	Valid
X2.13	0,756	Valid
X2.14	0,537	Valid
X2.15	0,650	Valid
X2.16	0,627	Valid
X2.17	0,555	Valid
X2.18	0,579	Valid
X2.19	0,693	Valid
X2.20	0,705	Valid
X2.21	0,723	Valid
X2.22	0,609	Valid
X2.23	0,752	Valid
X2.24	0,734	Valid
X2.25	0,728	Valid

X2.26	0,730	Valid
X2.27	0,687	Valid
X2.28	0,764	Valid

Sumber data diolah peneliti (2019)

Tabel 4.9
Uji Validitas

Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)

Variabel	Validitas	
	Pearson Correlation	Kesimpulan
X3.1	0,775	Valid
X3.2	0,769	Valid
X3.3	0,817	Valid
X3.4	0,700	Valid
X3.5	0,652	Valid
X3.6	0,849	Valid
X3.7	0,748	Valid
X3.8	0,777	Valid
X3.9	0,788	Valid
X3.10	0,836	Valid
X3.11	0,868	Valid
X3.12	0,593	Valid
X3.13	0,636	Valid
X3.14	0,629	Valid
X3.15	0,758	Valid
X3.16	0,732	Valid
X3.17	0,820	Valid
X3.18	0,868	Valid
X3.19	0,756	Valid
X3.20	0,768	Valid

Sumber data diolah peneliti (2019)

Tabel 4.10
Uji Validitas

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Variabel	Validitas	
	Pearson Correlation	Kesimpulan
Y1	0,753	Valid
Y2	0,754	Valid
Y3	0,752	Valid
Y4	0,689	Valid
Y5	0,668	Valid
Y6	0,599	Valid
Y7	0,787	Valid
Y8	0,617	Valid

Sumber data diolah peneliti (2019)

4.1.8 Uji Reabilitas

Dalam melakukan penelitian dengan kuisisioner, dibutuhkan uji reabilitas untuk melihat apakah kuisisioner yang digunakan dalam penelitian masih tetap signifikan apabila digunakan dalam penelitian lagi. Uji reabilitas mengacu pada nilai *cronbach Alpha*, yang apabila nilai *cronbach alpha* > 0,60 maka kuisisioner tersebut bersifat reliabel.

Tabel 4.11
Uji Reabilitas

Cronbach Alpha Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,824	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	0,941	Reliabel
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (X3)	0,960	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,852	Reliabel

Sumber data diolah peneliti (2019)

Menurut (Ghozali, 2011: 48) menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Dengan demikian apabila semua variabel menunjukkan mempunyai *Cronbach Alfa* lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dikatakan handal.

Dilihat dari perhitungan SPSS dapat diketahui bahwa nilai cronbach alpha untuk kompetensi sumber daya manusia (X1) sebesar 0,824, Penerapan Standar Akuntansi pemerintah (X2) sebesar 0,941, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (X3) sebesar 0,960 dan untuk variabel (Y) Kualitas Lapran Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,852 maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel diatas bernilai diatas ,<0,60 maka bisa dikatakan bersifat reliabel.

4.1.9 Uji Asumsi Klasik

4.1.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas maka disini menggunakan uji *kolmogorov-Smirnov*. Dalam uji *kolmogorov-Smirnov*, jika nilai *kolmogorov-Smirnov* $>0,05$ maka bisa dikatakan signifikan dan jika $<0,05$ maka dikatakan tidak signifikan. Berikut hasil tes SPSS uji *kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut.

Tabel 4.12
Uji *kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^a	Std. Deviation	1.96725432
.b		
Most	Absolute	.118
Extreme	Positive	.118
Differences	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134 ^c

Sumber data diolah peneliti (2019)

Dari hasil perhitungan spss dalam penelitian ini, dapat dikatakan tingkat signifikan X1, X2, DAN X3 dari hasil uji *kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,118 sehingga dapat dikatakan nilai tersebut menunjukkan

asumsi normalitas terpenuhi. Berdasarkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dengan nilai 0,134 yang berarti lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.9.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen. Dalam melakukan uji multikolinieritas maka digunakan model regresi menggunakan nilai *tolerance* (t) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila ditemukan adanya multikolinieritas sempurna akan mengakibatkan koefisien regresi tidak ditemukan dan standart deviasi menjadi tidak terhingga. Dalam regresi meskipun koefisiennya mempunyai standart deviasi yang besar yang berarti koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan mudah, dalam menentukan uji multikolinieritas dilihat dari nilai VIF yang mendekati 1 dan mempunyai nilai *tolerance* dibawah 10.

Tabel 4.13
Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8.870	3.982		2.227	.031		
X1	-.002	.105	-.002	-.017	.987	.826	1.211
X2	.005	.058	.014	.081	.935	.409	2.446
X3	.270	.071	.675	3.800	.000	.410	2.436

Sumber Data diolah oleh peneliti (2019)

Dari perhitungan SPSS diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) sebesar 0,826, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) sebesar 0,409 dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) sebesar 0,410 yang berarti ketiga variabel tersebut memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Dan juga nilai VIF memiliki nilai masing-masing sebesar 1,211 (X1), 2,446 (X2) dan 2,436 (X3) yang berarti memiliki nilai VIF lebih besar dari 10,0. Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terdapat gejala multikolonieritas dan memenuhi uji asumsi multikolonieritas.

4.1.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Adanya uji heteroskedastisitas yaitu untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dalam uji heteroskedastisitas digunakan uji glester antara variabel independen dengan nilai *absoluteresidual*. Apabila nilai signifikan antara nilai variabel dengan *absolut residual* lebih dari 0,05 atau 1.000 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.14
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.331	2.474		1.751	.088
Kompetensi SDM (X1)	.009	.065	.022	.131	.897
Penerapan SAD (X2)	-.067	.036	-.433	-1.854	.071
Sistem AKD (X3)	.045	.044	.240	1.027	.310

Sumber data diolah peneliti (2019)

Dari hasil perhitungan spss diatas dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

4.1.10 Uji Hipotesis

4.1.10.1 Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji kebenaran yang diperoleh signifikan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel terikat secara parsial atau masing-masing. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independet terhadap variabel dependent.

Berikut tabel uji persial (uji t) dalam variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) terhadap variabel Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota batu (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Uji Parsial (Uji t) X1-Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.628	3.702		4.221	.000
Kompetensi SDM (X1)	.327	.108	.418	3.021	.004

Sumber data diolah peneliti (2019)

Bedasarkan tabel diatas Hasil uji t (parsial) pada model regresi diperoleh nilai signifikasi variabel kompetensi sumber daya

manusia (X1) sebesar $0,004 < 0,05$. Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.021 sedangkan t_{tabel} 1,682. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3021 > 1.682$, maka dapat dijelaskan bahwa H_{01} ditolak atau H_{a1} diterima, artinya secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y).

Berikut tabel uji parsial (uji t) dalam variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) terhadap variabel Kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y) sebagai berikut :

Tabel 4.16
Uji Parsial (Uji t) X2-Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.107	3.858		2.879	.006
Penerapan SAD (X2)	.173	.043	.528	4.073	.000

Sumber data diolah peneliti (2019)

Bedasarkan tabel diatas Hasil uji t (parsial) pada model regresi diperoleh nilai signifikansi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang

menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4.073 sedangkan t_{tabel} 1.682. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.073 > 1.682$, maka dapat dijelaskan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima yang artinya secara parsial variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y).

Berikut tabel uji parsial (uji t) dalam variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) terhadap variabel Kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y) sebagai berikut :

Tabel 4.17
Uji Parsial (Uji t) X3-Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.975	2.899		3.095	.003
Sistem AKD (X3)	.274	.044	.685	6.165	.000

Sumber data diolah peneliti (2019)

Hasil uji t (secara parsial) pada model regresi diperoleh nilai signifikansi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6.165 dan t_{tabel} sebesar 1.682. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6.165 > 1.682$ bahwa H_0 ditolak atau H_a

diterima yang artinya secara parsial variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel Kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y).

Berdasarkan hasil pengujian parsial uji t di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan X1 terhadap Y memiliki nilai signifikansi sebesar 0,077 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah kota batu (Y) tidak memiliki hubungan yang signifikan. Sedangkan hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) memiliki nilai sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel X2 dan X3 memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah kota batu (Y).

4.1.10.2 Secara Simultan (uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2, X3) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen (Y) Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 5% atau signifikan α sebesar 5% = 0,05 Jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh

yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independent terhadap variabel dependent .Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independent terhadap variabel dependent. Berikut adalah tabel hasil uji simultan (uji F).

Tabel 4.18
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	151.257	3	50.419	12.085	.000 ^b
Residual	171.054	41	4.172		
Total	322.311	44			

Sumber data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji f) pada tabel di atas, didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari *significance* level 0,05 (5%), yaitu $0,000 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara f_{hitung} dan f_{tabel} yang menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar 12.085 sedangkan f_{tabel} sebesar 2.82. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $12.085 > 2.82$ bahwa secara simultan H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima yang artinya secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen Kompetensi sumber daya manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) yaitu berpengaruh secara

signifikan positif terhadap variabel dependen Kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y).

4.1.103 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia (X1), penerapan standar akuntansi pemerintah (X2), dan sistem akuntansi keuangan daerah (x3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y). Adapun hasil perhitungan tabel Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.469	.430	2.04256

Sumber data diolah peneliti (2019)

Dari hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) menggunakan SPSS, maka dapat diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0.430 sedangkan nilai R Square sebesar 0.469. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (X1), penerapan standar akuntansi pemerintah (X2), dan sistem akuntansi keuangan daerah(X3) berpengaruh sebesar 46,9% dan sisanya 53,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Y)

Hasil penelitian menunjukkan dari kuesioner yang telah disebar dan pernyataan dari seluruh responden bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia (X1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y) menunjukkan kategori positif yang bisa kita lihat dari hipotesis pertama dimana hasil uji t (parsial) pada model regresi diperoleh nilai signifikansi variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) sebesar $0,004 < 0,05$. Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.021 sedangkan t_{tabel} 1,682. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3021 > 1.682$ yang memaparkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y).

Didukung oleh karakteristik responden yang telah diuji oleh peneliti dimana bisa dilihat dari karakteristik jenis kelamin persentase paling banyak adalah perempuan sebesar 72% serta berdasarkan usia umur paling banyak antara umur 31-40 tahun dan menurut karakteristik responden berdasarkan pendidikan paling banyak tingkat pendidikan S1 sebesar 56% dan karakteristik lama bekerja paling banyak adalah 6-10 tahun dengan persentase 52%. Jadi dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah didukung oleh responden

yang rata-rata jenis kelaminnya perempuan dimana kita tahu bahwa seorang perempuan lebih bisa mendalami karakternya dalam bidang apapun yang digeluti sehingga menimbulkan sebuah kompetensi yang baik dalam satu organisasi yang ditekuninya.

Sedangkan jika dikaitkan dengan umur responden bisa kita lihat bahwa responden dalam penelitian ini sudah memiliki umur yang sangat matang dalam berkarir yaitu umur 31-40 tahun dan juga pendidikan yang telah ditempuh sudah sarjana sehingga bisa dikatakan sudah memiliki ilmu yang baik yang dapat di praktikan dalam pekerjaannya, disini dapat dilihat juga dari lama bekerja sebanyak 6-10 tahun. Berarti dapat kita simpulkan bahwa suatu kompetensi sumber daya manusia dapat berkembang dalam diri pekerja seperti berpengetahuan, keterampilan serta sikap yang baik bisa dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik responden diatas. Jadi pegawai keuangan di pemerintah kota batu sudah memiliki kompetensi dalam dirinya didukung juga oleh hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu.

Pemaparan diatas menjadikan bukti bahwa kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan suatu pengetahuan, keterampilan dan perilaku akan sangat mempengaruhi suatu kualitas pekerjaan. Sebab jika dalam pekerjaan timbul suatu masalah pastinya akan membutuhkan suatu penyelesaian yang tepat sehingga sebagai pekerja dituntut untuk menguasai suatu kemampuan, keterampilan dan sikap dalam memutuskan

suatu masalah apa, mengapa, kapan, dan bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan tanpa terhambat dalam sebuah masalah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hardyansyah, 2016) yang menyatakan bahwa Pegawai yang memiliki kemampuan dibidangnya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan suatu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

4.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Y)

Hasil dari perhitungan dari kuesioner yang telah disebar kepada responden serta hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan hasil uji t (parsial) pada model regresi diperoleh nilai signifikansi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4.073 sedangkan t_{tabel} 1.682. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.073 > 1.682$, maka dapat dijelaskan bahwa H_{02} ditolak atau H_{a2} diterima yang artinya secara parsial variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y). Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah maka semakin berkualitas juga suatu laporan keuangannya.

Dilihat dari karakteristik responden yang ada salah satunya adalah pendidikan dapat kita lihat bahwa para responden sebanyak 56% menempuh pendidikan sarjana S1, sehingga pengetahuan tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sudah dimiliki oleh para pegawai keuangan dan bisa diterapkan dengan benar dalam menunjang kualitas laporan keuangan. Jadi dengan hal ini juga bisa dikatakan suatu karakteristik responden dengan pendidikan dapat juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan seperti juga hasil analisis data di atas.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Sri Pujanira (2017) dimana penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY dan menyatakan bahwa jika penerapan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan semakin baik maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas.

4.2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Y)

Hasil penelitian menunjukkan dari kuesioner yang telah disebar dan pernyataan dari seluruh responden serta hasil uji hipotesis yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa Hasil uji t (secara parsial) pada model regresi diperoleh nilai signifikansi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung}

sebesar 6.165 dan t_{tabel} sebesar 1.682. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $6.165 > 1.682$ bahwa H_{03} ditolak atau H_{a3} diterima yang artinya secara parsial variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel Kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y). Hal ini membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan yang dipakai oleh pemerintah kota batu merupakan sistem akuntansi yang baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah kesesuaian standar akuntansi pemerintah, prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan pembuatan laporan keuangan secara periodik dan konsisten sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Dari hasil uji diatas dapat dilihat dari kompetensi sumber daya dan penerapan standar akuntansi pemerintah bahwa keduanya signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pegawai keuangan kota batu memiliki kemampuan dalam membentuk sebuah kualitas laporan keuangan dengan kompetensi yang dimiliki yaitu pengetahuan, keterampilan serta sikap dan dengan hal itu mereka juga mampu menerapkan sebuah sistem dengan baik dengan pengetahuan yang dimiliki. Maka, tidak salah jika hasil analisis data bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Putriasri Pujanira (2017) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan jadi dengan begitu laporan keuangan harus memberikan informasi yang akurat dan oleh karena itu memerlukan sebuah pengambilan keputusan yang baik dengan mengguakan sistem akuntansi keuangan yang baik pula agar memperoleh sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

4.2.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2), dan Sistem Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji f), didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari *significance* level 0,05 (5%), yaitu $0,000 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara f_{hitung} dan f_{tabel} yang menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar 12.085 sedangkan f_{tabel} sebesar 2.82. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $12.085 > 2.82$ bahwa secara simultan H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima yang artinya secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen Kompetensi sumber daya manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) yaitu berpengaruh secara signifikan

positif terhadap variabel dependen Kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y).

Hasil ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki potensi atau peluang yang sangat tinggi dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik dan berkualitas jadi, semakin tinggi dan baik ketiga variabel digunakan, di implementasikan serta dipahami dengan baik maka suatu laporan keuangan pemerintah yang akan dihasilkan kan menjadi semakin baik dan efektif. Sebaliknya jika kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak digunakan dengan baik maka hasilnya pun tidak akan baik atau kurang efektif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu, Adithama (2012) dimana hasilnya untuk ketiga variabel yang dipakai untuk menguji suatu kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. hal itu dikatakan bahwa penerapan sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dikatakan juga oleh peneliti bahwa semakin baik suatu penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia maka semakin berkualitas dan baik pulalah suatu laporan keuangannya.

BAB V

PENUTUP

1.5 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu. Variabel yang independent yang digunakan yaitu Kompetensi sumber daya manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2), dan Sistem akuntansi keuangan daerah (X3). Sedangkan variabel dependent nya yaitu Kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu (Y). Berdasarkan hasil pengujian dan uji hipotesis yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu. Hal ini didukung karena adanya faktor- faktor yang dimiliki oleh pegawai yaitu pengetahuan, keterampilan serta perilaku sikap dalam pekerjaannya. Semakin tinggi suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap serta kompetensi sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan maka semakin baiklah perusahaan tersebut dalam penyajian hasil pekerjaannya terutama dalam hal kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah kota batu sudah baik dalam pelaksanaannya. Agar nilai laporan keuangan yang dihasilkan

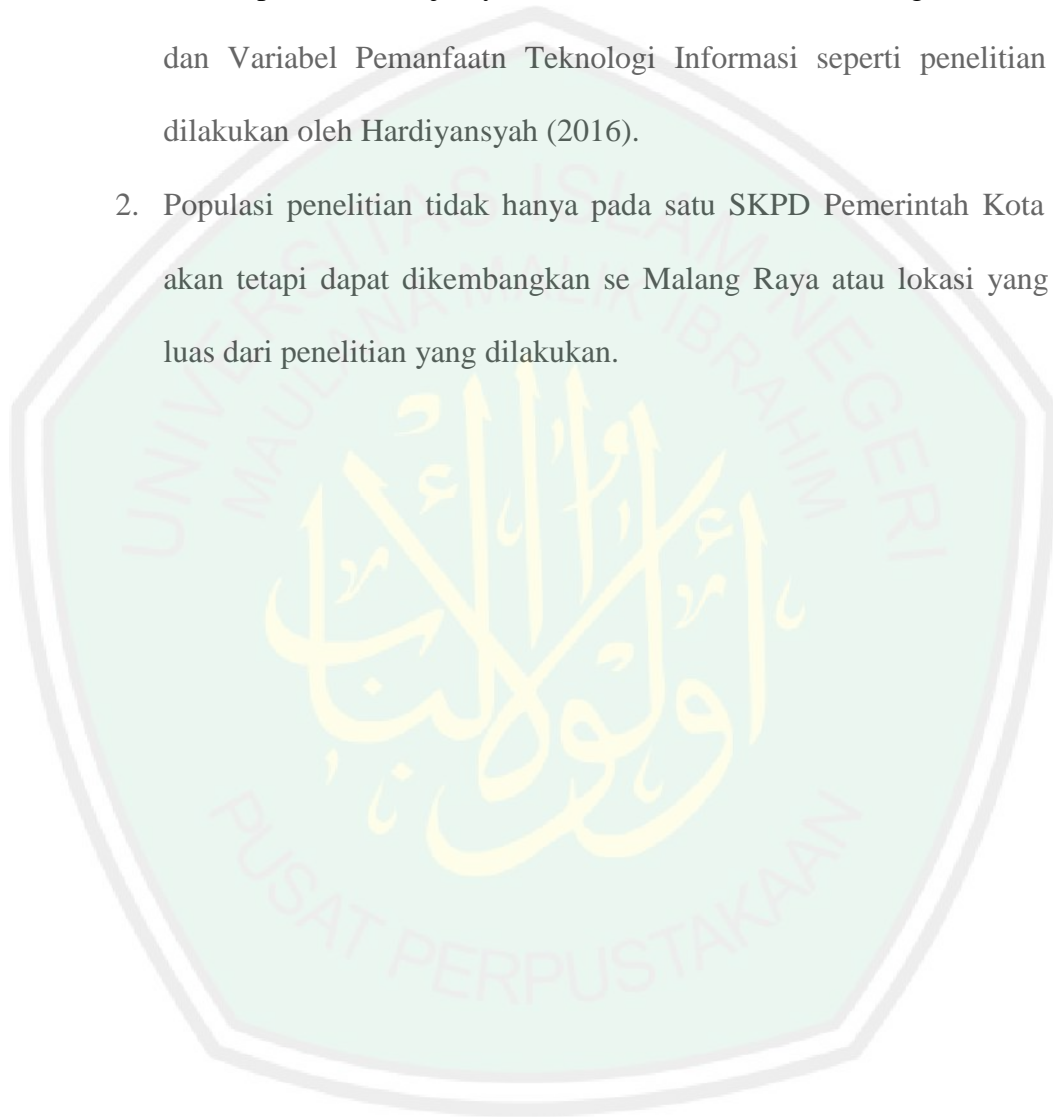
semakin baik lagi sebainya pemerintah mengkaji kembali standar akuntanis pemerintah semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah maka semakin berkualitas juga suatu laporan keuangannya.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu. Hal ini didukung oleh sistem yang digunakan secara komputerisasi maupun manual dalam kesuaian dengan standar akuntansi pemerintah serta prosedur pencatatan akuntansi yang berlaku umum dan pembuatan laporan keuangan secara periodik sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Jadi, semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan maka semakin berkualitas pula laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif secara bersamaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota batu. Apabila ketiga variabel tersebut digunakan seta diterapkan secara bersamaan dengan baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pun akan semakin baik dan bermanfaat bagi seluruh instansi yang ada di pemerintahan kota batu.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambah variabel Pengendalian Intern dan Variabel Pemanfaatn Teknologi Informasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Hardiyansyah (2016).
2. Populasi penelitian tidak hanya pada satu SKPD Pemerintah Kota Batu, akan tetapi dapat dikembangkan se Malang Raya atau lokasi yang lebih luas dari penelitian yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.

Abdullah, M, M. 2013. *Manajemen Bisnis Syariah*. Aswaja : Yogyakarta.

Abdurrahman Fathoni. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Rineka Cipta.

Afiyah, N.N. (2012). *Implementasi akuntansi keuangan pemerintah daerah* . Kencana : Jakarta.

Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Erlangga: Jakarta.

Darmadi. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kekepalasekolaaan "Melejitkan Produktivitas Kerja Kepala Sekolah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi"*, Yogyakarta : CV Budi Utama.

Erlina, Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Penerbit Brama Ardian : Sumatera Utara

Fikri Ahli Dzulfikar (2016). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang)*. Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) ISSN: 2337- 56xx Tahun 2016.

Ghozi Saiful (2015). *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi*. Deepublish : Yogyakarta

Hardyansyah (2016). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi pada skpd kabupaten polewali mandar*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban : Vol. I No. 1 Januari 2016.

Heidjrachman dan Suad, Husnan. 2002). *Manajemen Personalia*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), Yogyakarta

Hery. (2012). *Analisis laporan keuangan* . Bumi Aksara: Jakarta

Hullah, A. R., S. Pangemanan, S. Tangkuman dan N. Budiarmo. 2012. “*Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara*”, Jurnal Riset Akuntansi, Vol 3 – No 2: Halaman 9-21.

Indonesia. Menteri Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Retrieved November 13, 2014, from http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_24_2005.pdf

Katin wilda maysaroh (2018). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Sukoharjo)*. Publikasi Ilmiah Tahun 2018.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta

<https://mcw-malang.org/penyematan-opini-wtp-bpk-terhadap-pemerintah-kota-batu-tidak-menjamin-bersihnya-penyelenggaraan-pemerintahan/>

<https://klikanggaran.com/anggaran/kota-batu-temuan-bpk-tahun-2017-atas-ketidakpatuhan-kecurangan-dan-ketidakpatutan-sudahkah-ditindaklanjuti.html>

Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang : UB Press Malang.

Kusumo, Ramadhani (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Moehariono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Grafindo Persada, Jakarta.

Nawawi. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gajah Mada University.

Nurillah (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.*(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomer. 71 Tahun 2010. Diakses pada 1 November 2015, dari <http://www.djpk.depkeu.go.id>

Pujanira, Putriasri. (2017). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Nominal/Volume VI Nomor 2/ Tahun 2017.

Purnaya, Gusti Ketut. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sekaran, U. (2011). *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta: Bandung

Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

Indriantoro & Bambang Supomo (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE

Ghazali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghazali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wardani dan Yuwilia (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu)*. Institusi USU, Universitas Sumatera Utara. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/827>

Widyatama, Novita & Diarespati (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02, No. 02 (2017).

Adithama, Surya (2012). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir)*.



The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a shield-shaped emblem. It features a light green background with a white border. The text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" is written in a light green, sans-serif font along the top inner edge of the shield. In the center, there is a yellow calligraphic emblem. At the bottom, the text "PUSAT PERPUSTAKAAN" is written in a light green, sans-serif font along the bottom inner edge. The word "LAMPIRAN" is superimposed over the center of the logo in a large, bold, black, serif font.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh pegawai bidang keuangan di seluruh SKPD Daerah pemerintah kota batu.
2. Daftar pertanyaan diisi dengan cara memberi tanda checklist (√) pada salah satu alternatif pilihan.
3. Pengisian dibenarkan hanya untuk satu alternatif jawaban yang paling benar.
 SS = Sangat Setuju
 S = Setuju
 TS = Tidak Setuju
 STS = Sangat Tidak Setuju
4. Bila ada pembatalan jawaban dari jawaban semula, maka jawaban semula cukup diberi tanda silang (x) kemudian diberi tanda checklist (√) pada jawaban pengganti

A. Pertanyaan Umum

Keterangan : Diisi dengan menggunakan tanda (√) sesuai dengan jawaban yang saudara anggap benar.

Identitas Responden

Nama Bapak/Ibu:

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Usia :

No Telepon/HP :

Pendidikan Terakhir :

SMA

Magister (S2)

Diploma

Lainnya.....

Sarjana

Lama Bekerja :

1-5 Tahun

6-10 Tahun

> 10 Tahun

B. Pertanyaan khusus

Daftar Kuesioner

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
Relevan					
1	Laporan keuangan memiliki informasi yang dapat mengoreksi kesalahan di masa lalu.				
2	Informasi laporan keuangan yang diperoleh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)				
3	Laporan keuangan memenuhi kebutuhan pemakainya.				
4	informasi laporan keuangan telah mencakup semua informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.				
5.	Laporan keuangan diterbitkan tepat waktu sesuai periode akuntansi.				
Andal					
6	Bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.				
7	Laporan keuangan menghasilkan informasi dengan jujur semua transaksi dan peristiwa keuangan yang seharusnya disajikan.				
8	informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.				

Dapat Dipahami					
9	Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas oleh pengguna.				
10	Informasi yang tersedia dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.				
Dapat Dibandingkan					
11	Informasi yang terdapat di Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.				

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
Pengetahuan					
1	Penatausahaan Keuangan bertugas melaksanakan fungsi akuntansi.				
2	Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 adalah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik.				
3	Pengetahuan tentang akuntansi merupakan proses pengindifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu entitas atau organisasi.				
4	Persamaan akuntansi pemerintah yaitu, Aset-kewajiban = Ekuitas dana.				
5	Memahami Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik.				

6	Untuk lebih menambah suatu pengetahuan dibidang akuntansi saya sering membaca literatur berupa buku- buku dan jurnal akuntansi.				
Keterampilan					
1	Saya dapat membuat jurnal setiap transaksi.				
2	Saya dapat memposting jurnal ke buku besar.				
3	Saya menyusun dan menyajikan neraca dengan baik.				
4	Saya dapat menyusun dan menyajikan laporan arus kas.				
5	Saya dapat menyajikan Catatan atas laporan keuangan secara rinci dan terdapat pemahaman di setiap pos-pos yang ada.				
6	Saya berpartisipasi dalam pelatihan yang terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.				
Perilaku					
1	Saya dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.				
2	Saya mematuhi kewajiban sebagai pegawai dengan baik.				

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
PSAP No 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan					
1	Pada instansi tempat saya bekerja penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.				
2	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah.				

3	Instansi tempat saya bekerja telah menerapkan basis akrual untuk mengakui aset.				
4	Instansi tempat saya bekerja telah menerapkan basis akrual untuk mengakui kewajiban.				
PSAP No. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran					
1	Pada instansi tempat saya bekerja telah mencatat pendapatan sesuai asas bruto.				
2	Pada instansi tempat saya bekerja saat ada pengeluaran dari rekening kas mengakuinya sebagai belanja				
3	Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di rekening kas.				
PSAP No. 3 Tentang Laporan Arus Kas					
1	Pada instansi tempat Saya bekerja telah menyusun laporan arus kas sesuai SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.				
2	Pada instansi ini telah menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas operasi.				
PSAP No. 4 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan					
1	Pada instansi ini telah menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.				
2	Catatan atas laporan keuangan meliputi pemaparan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan.				
PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan					
1	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah.				
2	Pencatatan persediaan telah dilaksanakan berdasarkan inventarisasi fisik.				
PSAP No. 6 Tentang Akuntansi Investasi					

1	Pada Instansi ini telah mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur.				
2	Pada instansi tempat saya bekerja telah mencatat investasi sebesar biaya perolehan untuk kepemilikan permanen.				
3	Telah menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan untuk penilaian investasi atas kepemilikan non-permanen pada instansi tempat saya.				
PSAP No. 7 Tentang Aset Tetap					
1	Telah mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas pada tempat saya bekerja.				
2	Mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan.				
PSAP No. 8 Tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan					
1	Instansi ini telah mengungkapkan informasi kontruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi.				
2	Pada instansi ini, jika pekerjaankontruksi telah selesai maka memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap.				
PSAP No. 9 Tentang Akuntansi Kewajiban					
1	Instansi ini mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan pada saat kewajiban timbul.				
2	Pada instansi ini, telah mencatat kewajiban sesuai dengan nilai nominal.				
PSAP No. 10 Tentang Koreksi Kesalahan					
1	Koreksi merupakan tindakan pembenaran agar pos-pos yang tersedia sesuai dengan yang seharusnya.				

2	Instansi ini melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan.				
PSAP No. 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi					
1	Instansi ini dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasi.				
2	Laporan keuangan konsolidasi yang dibuat oleh instansi ini, telah mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.				
PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional					
1	Instansi ini menyusun laporan operasional pada periode akuntansi.				
2	Telah dibuat laporan operasional yang mencakup pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.				

4. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah					
1	Penerapan Sistem akuntansi yang diterapkan pada instansi ini telah sesuai SAP.				
2	Basis akuntansi penyusun laporan keuangan berbasis akrual.				
3	Pada instansi ini telah melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi.				
Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang berlaku Umum					
1	Sistem akuntansi keuangan daerah sekurang-kurangnya memuat 4 prosedur.				
2	Instansi ini melakukan prosedur penerimaan kas sesuai dengan sistem akuntansi.				

3	Instansi ini melaksanakan prosedur pengeluaran kas sesuai dengan sistem akuntansi.				
4	Instansi ini melakukan prosedur akuntansi selain kas (akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi kewajiban, akuntansi investasi, dan akuntansi ekuitas).				
5	Melakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan yang terjadi di instansi ini.				
6	Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara kronologis.				
7	Setiap pencatatan transaksi yang ada disertai oleh bukti transaksi.				
8	Instansi ini melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang telah terjadi.				
9	Dokumen pencatatan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.				
10	Instansi ini melakukan kalsifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos yang seharusnya.				
Pembutan Laporan Keuangan Secara Periodik					
1	Instansi ini dilakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan.				
2	Laporan keuangan pada instansi ini dibuat setiap periode akuntansi.				
3	Unsur yang terdapat dalam LRA adalah pendapatan LRA, Belanja dan pembiayaan.				
4	Dalam laporan operasional terdapat unsur pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.				
5	Dalam laporan neraca terdapat unsur asset, kewajiban, dan ekuitas.				
6	Dalam laporan arus kas terdapat unsur arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan				

	aktivitas investasi.				
7	Pada instansi instansi ini pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.				



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Foto bersama karyawan keuangan Bagian Keuangan Pemerintah kota beserta menyerahkan kuesioner penelitian



Lampiran 3. Tabulasi Data Penelitian

Data penelitian variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)

Responden	Butir Pertanyaan Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	4	3	3	3	3	3	27
2	3	4	4	3	4	4	4	3	29
3	4	4	3	3	3	2	3	4	26
4	3	4	3	3	3	4	3	3	26
5	3	3	3	3	3	3	3	3	24
6	3	3	3	3	3	3	3	3	24
7	4	3	3	4	3	4	3	4	28
8	3	4	4	3	3	3	3	3	26
9	3	3	3	3	3	3	3	3	24
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	3	3	4	4	4	30
12	4	4	3	3	3	3	4	4	28
13	3	3	4	3	3	3	3	3	25
14	3	3	3	3	3	4	3	3	25
15	3	4	3	3	3	3	3	4	26
16	3	4	3	3	3	3	3	4	26
17	3	3	3	3	3	3	3	3	24
18	3	3	3	3	3	3	3	3	24
19	3	3	3	3	3	4	3	3	25
20	3	4	3	4	3	4	4	3	28

21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
23	4	4	4	4	3	4	4	4	31
24	3	3	4	3	4	3	4	3	27
25	4	4	4	3	4	3	3	3	28
26	3	3	3	3	3	3	3	3	24
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	3	3	3	3	3	3	3	3	24
29	3	3	2	3	3	4	3	3	24
30	4	3	3	3	3	3	3	3	25
31	3	3	3	3	3	3	3	3	24
32	3	3	3	3	3	3	3	3	24
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	3	3	3	3	3	3	3	3	24
35	3	3	3	3	3	3	3	3	24
36	4	4	4	4	4	4	4	3	31
37	4	4	4	3	3	4	3	4	29
38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	4	4	4	3	4	4	4	3	30
40	4	4	4	3	3	3	3	4	28
41	3	3	4	4	4	4	3	3	28
42	4	4	4	3	3	3	4	3	28
43	3	3	3	3	3	3	3	3	24
44	3	3	4	3	3	4	4	3	27
45	4	4	4	3	3	3	4	4	29

Data Penelitian Variabel X1 (Kompetensi Sumber Daya Manusia)

Responden	Butir Pertanyaan Variabel X1 (Kompetensi Sumber Daya Manusia)											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	31
2	3	4	4	3	3	3	4	2	4	4	4	38
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
5	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	28
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
10	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	31
11	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	31
12	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	36
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
14	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
17	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	29
18	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	31
19	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33

21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
23	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	38
24	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	36
25	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	40
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
27	3	4	3	2	1	1	1	1	1	4	4	25
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	35
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
31	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	36
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
33	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	39
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
35	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	36
36	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	39
37	3	3	4	3	4	2	3	3	2	3	3	33
38	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	37
39	3	2	2	3	3	3	2	2	4	3	4	31
40	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	35
41	3	4	4	3	4	3	4	2	3	4	4	38
42	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	40
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
44	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
45	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	41

Data Penelitian Variabel X2 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah)

Responden	Butir Pernyataan Variabel X2 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah)																												Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	81
2	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	96
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84
4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	98
5	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	81
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84
7	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	97
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84
14	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	88
15	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	102
16	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	102
17	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	74
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	84
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83
20	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	98

Data Penelitian Variabel X3 (Sistem Akuntansi Pemerintah)

Responden	Butir Pertanyaan X3 (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)																				Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	61
2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	75
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	68
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
7	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	64
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	77

21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	61
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
24	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	62
25	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
29	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	65
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
31	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	68
32	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
34	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
36	3	2	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	67
37	3	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	63
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	74
39	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	75
40	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	69
41	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	70
42	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	68
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
44	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	68
45	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	70

Lampiran 4. Hasil Uji Penelitian

- **Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi SDM	45	25.00	41.00	33.9556	3.23304
Penerapan SAD	45	74.00	109.00	90.3778	8.24701
Sistem AKD	45	57.00	80.00	64.9333	6.77026
Kualitas LKP	45	24.00	32.00	26.7556	2.70652
Valid N (listwise)	45				



- Uji Validitas

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Correlations

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Variabel X1
Item 1	Pearson Correlation	1	.568**	.722**	.306*	.228	.284	.135	.295*	.290	.058	.233	.615**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.041	.133	.059	.377	.049	.054	.704	.124	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 2	Pearson Correlation	.568**	1	.633**	.279	.107	.058	.204	-.095	.056	.287	.262	.500**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.064	.486	.705	.178	.534	.715	.056	.082	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 3	Pearson Correlation	.722**	.633**	1	.416**	.415**	.225	.451**	.150	.218	.338*	.327*	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.005	.005	.137	.002	.324	.150	.023	.028	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 4	Pearson Correlation	.306*	.279	.416**	1	.725**	.542**	.434**	.244	.495**	.081	.201	.735**
	Sig. (2-tailed)	.041	.064	.005		.000	.000	.003	.107	.001	.596	.185	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 5	Pearson Correlation	,228	,107	.415**	.725**	1	.613**	.668**	.332*	.387**	,019	,120	.724**
	Sig. (2-tailed)	,133	,486	,005	,000		,000	,000	,026	,009	,900	,433	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 6	Pearson Correlation	,284	,058	,225	.542**	.613**	1	.763**	.567**	.621**	-,080	-,056	.710**
	Sig. (2-tailed)	,059	,705	,137	,000	,000		,000	,000	,000	,602	,713	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 7	Pearson Correlation	,135	,204	.451**	.434**	.668**	.763**	1	.453**	.505**	,139	,026	.745**
	Sig. (2-tailed)	,377	,178	,002	,003	,000	,000		,002	,000	,364	,867	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 8	Pearson Correlation	.295*	-,095	,150	,244	.332*	.567**	.453**	1	,259	-,293	-,345*	.410**
	Sig. (2-tailed)	,049	,534	,324	,107	,026	,000	,002		,086	,051	,020	,005
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 9	Pearson Correlation	,290	,056	,218	.495**	.387**	.621**	.505**	.259	1	,089	,265	.648**
	Sig. (2-tailed)	,054	,715	,150	,001	,009	,000	,000	,086		,561	,078	,000

	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 10	Pearson Correlation	,058	,287	.338*	,081	,019	-,080	,139	-,293	,089	1	.817**	.334*
	Sig. (2-tailed)	,704	,056	,023	,596	,900	,602	,364	,051	,561		,000	,025
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 11	Pearson Correlation	,233	,262	.327*	,201	,120	-,056	,026	-,345*	,265	.817**	1	.396**
	Sig. (2-tailed)	,124	,082	,028	,185	,433	,713	,867	,020	,078	,000		,007
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Kompetensi SDM	Pearson Correlation	.615**	.500**	.737**	.735**	.724**	.710**	.745**	.410**	.648**	.334*	.396**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,005	,000	,025	,007	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)

Correlations

Item 2	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	Item 1
,000	.695**	45		1	Item 1
	1	45	,000	.695**	Item 2
,000	.559**	45	,000	.560**	Item 3
,000	.516**	45	,000	.613**	Item 4
,080	,264	45	,000	.510**	Item 5
,011	.376*	45	,011	.375*	Item 6
,048	.296*	45	,044	.302*	Item 7
,016	.359*	45	,050	,294	Item 8
,450	,115	45	,315	,153	Item 9
,926	,014	45	,775	-,044	Item 10
,006	.400**	45	,124	,233	Item 11
,118	,237	45	,217	,188	Item 12
,086	,258	45	,176	,205	Item 13
,081	,263	45	,003	.437**	Item 14
,001	.493**	45	,065	,277	Item 15
,004	.424**	45	,464	,112	Item 16
,163	,212	45	,315	,153	Item 17
,741	,051	45	,980	,004	Item 18
,009	.386**	45	,048	.296*	Item 19
,017	.355*	45	,191	,199	Item 20
,000	.504**	45	,068	,274	Item 21
,043	.303*	45	,014	.363*	Item 22
,010	.378*	45	,028	.328*	Item 23
,001	.482**	45	,000	.604**	Item 24
,002	.459**	45	,001	.471**	Item 25
,001	.463**	45	,000	.583**	Item 26
,017	.355*	45	,049	.295*	Item 27
,004	.419**	45	,016	.358*	Item 28
,000	.610**	45	,000	.562**	Variabel x2

Item 4		Item 3			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,000	.613**	45	,000	.560**	45
,000	.516**	45	,000	.559**	45
,000	.859**	45		1	45
	1	45	,000	.859**	45
,000	.522**	45	,002	.441**	45
,009	.386**	45	,000	.526**	45
,039	.308*	45	,027	.330*	45
,009	.385**	45	,031	.321*	45
,004	.418**	45	,017	.354*	45
,357	,140	45	,721	,055	45
,030	.324*	45	,017	.354*	45
,077	,266	45	,176	,205	45
,053	,291	45	,004	.418**	45
,014	.364*	45	,048	.297*	45
,056	,287	45	,043	.303*	45
,078	,265	45	,015	.362*	45
,340	,145	45	,084	,261	45
,251	,175	45	,197	,196	45
,202	,194	45	,151	,217	45
,008	.390**	45	,003	.427**	45
,000	.543**	45	,000	.591**	45
,000	.543**	45	,007	.397**	45
,004	.418**	45	,002	.459**	45
,000	.516**	45	,002	.459**	45
,053	,291	45	,031	.321*	45
,001	.492**	45	,031	.322*	45
,056	,287	45	,031	.322*	45
,017	.354*	45	,001	.494**	45
,000	.648**	45	,000	.654**	45

Item 6		Item 5			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,011	.375*	45	,000	.510**	45
,011	.376*	45	,080	,264	45
,000	.526**	45	,002	.441**	45
,009	.386**	45	,000	.522**	45
,000	.528**	45		1	45
	1	45	,000	.528**	45
,001	.482**	45	,121	,234	45
,686	,062	45	,168	,209	45
,561	,089	45	,105	,245	45
,521	-,098	45	,521	,098	45
,604	,079	45	1,000	,000	45
,712	,057	45	,208	,191	45
,242	,178	45	,880	-,023	45
,141	,223	45	,256	,173	45
,247	,176	45	,876	,024	45
,041	.306*	45	,618	,076	45
,187	,200	45	,561	-,089	45
,960	-,008	45	,765	,046	45
,103	,246	45	,242	,178	45
,044	.302*	45	,185	,201	45
,153	,217	45	,168	,209	45
,153	,217	45	,029	.325*	45
,011	.376*	45	,876	,024	45
,090	,256	45	,009	.384**	45
,005	.410**	45	,029	.325*	45
,003	.427**	45	,002	.452**	45
,003	.427**	45	,623	,075	45
,065	,278	45	,749	,049	45
,002	.448**	45	,012	.372*	45

Item 8		Item 7			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,050	,294	45	,044	,302*	45
,016	,359*	45	,048	,296*	45
,031	,321*	45	,027	,330*	45
,009	,385**	45	,039	,308*	45
,168	,209	45	,121	,234	45
,686	,062	45	,001	,482**	45
,981	,004	45		1	45
	1	45	,981	,004	45
,000	,540**	45	,838	,031	45
,001	,465**	45	,079	-,265	45
,000	,553**	45	,903	,019	45
,000	,560**	45	,983	,003	45
,004	,418**	45	,274	,167	45
,447	,116	45	,168	,209	45
,006	,403**	45	,477	,109	45
,060	,282	45	,194	,197	45
,017	,354*	45	,412	-,125	45
,001	,483**	45	,762	,047	45
,000	,536**	45	,128	,231	45
,003	,427**	45	,279	,165	45
,007	,397**	45	,088	,257	45
,001	,494**	45	,538	,094	45
,000	,559**	45	,048	,296*	45
,016	,359*	45	,001	,465**	45
,000	,612**	45	,027	,330*	45
,000	,532**	45	,022	,341*	45
,031	,322*	45	,279	,165	45
,008	,391**	45	,033	,318*	45
,000	,665**	45	,032	,321*	45

Item 10		Item 9			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,775	-,044	45	,315	,153	45
,926	,014	45	,450	,115	45
,721	,055	45	,017	,354*	45
,357	,140	45	,004	,418**	45
,521	,098	45	,105	,245	45
,521	-,098	45	,561	,089	45
,079	-,265	45	,838	,031	45
,001	,465**	45	,000	,540**	45
,000	,670**	45		1	45
	1	45	,000	,670**	45
,009	,387**	45	,010	,382**	45
,000	,520**	45	,030	,324*	45
,084	,260	45	,017	,354*	45
,560	-,089	45	,364	,139	45
,082	,262	45	,163	,212	45
,072	,271	45	,052	,291	45
,244	,177	45	,057	,286	45
,047	,297*	45	,037	,312*	45
,492	,105	45	,349	,143	45
,077	,267	45	,014	,363*	45
,207	,192	45	,017	,354*	45
,207	,192	45	,017	,354*	45
,135	,226	45	,000	,500**	45
,431	,120	45	,040	,308*	45
,302	,157	45	,084	,261	45
,072	,267	45	,001	,469**	45
,307	,156	45	,082	,262	45
,104	,246	45	,025	,334*	45
,015	,360*	45	,000	,539**	45

Item 12	Item 11				
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,217	,188	45	,124	,233	45
,118	,237	45	,006	,400**	45
,176	,205	45	,017	,354*	45
,077	,266	45	,030	,324*	45
,208	,191	45	1,000	,000	45
,712	,057	45	,604	,079	45
,983	,003	45	,903	,019	45
,000	,560**	45	,000	,553**	45
,030	,324*	45	,010	,382**	45
,000	,520**	45	,009	,387**	45
,000	,780**	45		1	45
	1	45	,000	,780**	45
,000	,649**	45	,000	,752**	45
,214	,189	45	,135	,227	45
,001	,461**	45	,000	,526**	45
,006	,404**	45	,001	,465**	45
,315	,153	45	,056	,287	45
,002	,442**	45	,005	,415**	45
,001	,491**	45	,000	,570**	45
,008	,391**	45	,000	,575**	45
,002	,452**	45	,000	,642**	45
,002	,452**	45	,002	,443**	45
,028	,328*	45	,000	,503**	45
,028	,328*	45	,006	,400**	45
,050	,294	45	,017	,354*	45
,049	,295*	45	,015	,359*	45
,001	,487**	45	,000	,575**	45
,002	,452**	45	,000	,643**	45
,000	,619**	45	,000	,715**	45

Item 14		Item 13			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,003	.437**	45	,176	,205	45
,081	,263	45	,086	,258	45
,048	.297*	45	,004	.418**	45
,014	.364*	45	,053	,291	45
,256	,173	45	,880	-,023	45
,141	,223	45	,242	,178	45
,168	,209	45	,274	,167	45
,447	,116	45	,004	.418**	45
,364	,139	45	,017	.354*	45
,560	-,089	45	,084	,260	45
,135	,227	45	,000	.752**	45
,214	,189	45	,000	.649**	45
,001	.477**	45		1	45
	1	45	,001	.477**	45
,000	.502**	45	,000	.504**	45
,002	.451**	45	,000	.522**	45
,000	.571**	45	,000	.540**	45
,025	.335*	45	,000	.675**	45
,012	.372*	45	,000	.643**	45
,469	,111	45	,000	.532**	45
,372	,136	45	,000	.591**	45
,134	,227	45	,007	.397**	45
,016	.357*	45	,000	.559**	45
,000	.543**	45	,002	.459**	45
,001	.477**	45	,004	.418**	45
,006	.404**	45	,031	.322*	45
,006	.404**	45	,000	.637**	45
,059	,284	45	,000	.801**	45
,000	.537**	45	,000	.756**	45

Item 16	Item 15				
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,464	,112	45	,065	,277	45
,004	,424**	45	,001	,493**	45
,015	,362*	45	,043	,303*	45
,078	,265	45	,056	,287	45
,618	,076	45	,876	,024	45
,041	,306*	45	,247	,176	45
,194	,197	45	,477	,109	45
,060	,282	45	,006	,403**	45
,052	,291	45	,163	,212	45
,072	,271	45	,082	,262	45
,001	,465**	45	,000	,526**	45
,006	,404**	45	,001	,461**	45
,000	,522**	45	,000	,504**	45
,002	,451**	45	,000	,502**	45
,000	,782**	45		1	45
	1	45	,000	,782**	45
,013	,368*	45	,006	,404**	45
,001	,468**	45	,004	,425**	45
,020	,344*	45	,001	,472**	45
,010	,380**	45	,003	,427**	45
,001	,469**	45	,016	,359*	45
,130	,229	45	,299	,158	45
,000	,507**	45	,001	,493**	45
,022	,341*	45	,008	,389**	45
,015	,362*	45	,000	,504**	45
,171	,208	45	,033	,318*	45
,010	,380**	45	,003	,427**	45
,002	,444**	45	,006	,407**	45
,000	,627**	45	,000	,650**	45

Item 18		Item 17			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,980	,004	45	,315	,153	45
,741	,051	45	,163	,212	45
,197	,196	45	,084	,261	45
,251	,175	45	,340	,145	45
,765	,046	45	,561	-,089	45
,960	-,008	45	,187	,200	45
,762	,047	45	,412	-,125	45
,001	,483**	45	,017	,354*	45
,037	,312*	45	,057	,286	45
,047	,297*	45	,244	,177	45
,005	,415**	45	,056	,287	45
,002	,442**	45	,315	,153	45
,000	,675**	45	,000	,540**	45
,025	,335*	45	,000	,571**	45
,004	,425**	45	,006	,404**	45
,001	,468**	45	,013	,368*	45
,006	,404**	45	1	1	45
,000	,586**	45	,006	,404**	45
,006	,401**	45	,001	,463**	45
,001	,494**	45	,084	,261	45
,044	,302*	45	,084	,261	45
,019	,348*	45	,000	,500**	45
,019	,348*	45	,040	,308*	45
,009	,387**	45	,000	,540**	45
,047	,297*	45	,014	,368*	45
,006	,401**	45	,000	,564**	45
,000	,575**	45	,003	,432**	45
,000	,579**	45	,000	,555**	45

Item 20		Item 19			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,191	,199	45	,048	,296*	45
,017	,355*	45	,009	,386**	45
,003	,427**	45	,151	,217	45
,008	,390**	45	,202	,194	45
,185	,201	45	,242	,178	45
,044	,302*	45	,103	,246	45
,279	,165	45	,128	,231	45
,003	,427**	45	,000	,536**	45
,014	,363*	45	,349	,143	45
,077	,267	45	,492	,105	45
,000	,575**	45	,000	,570**	45
,008	,391**	45	,001	,491**	45
,000	,532**	45	,000	,643**	45
,469	,111	45	,012	,372*	45
,003	,427**	45	,001	,472**	45
,010	,380**	45	,020	,344*	45
,001	,463**	45	,002	,449**	45
,006	,401**	45	,000	,586**	45
,000	,560**	45		1	45
	1	45	,000	,560**	45
,000	,707**	45	,002	,442**	45
,008	,392**	45	,002	,442**	45
,000	,572**	45	,009	,386**	45
,001	,463**	45	,001	,496**	45
,000	,532**	45	,000	,749**	45
,000	,545**	45	,000	,560**	45
,000	,545**	45	,002	,445**	45
,000	,613**	45	,000	,527**	45
,000	,705**	45	,000	,693**	45

Item 22		Item 21			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,014	.363*	45	,068	,274	45
,043	.303*	45	,000	.504**	45
,007	.397**	45	,000	.591**	45
,000	.543**	45	,000	.543**	45
,029	.325*	45	,168	,209	45
,153	,217	45	,153	,217	45
,538	,094	45	,088	,257	45
,001	.494**	45	,007	.397**	45
,017	.354*	45	,017	.354*	45
,207	,192	45	,207	,192	45
,002	.443**	45	,000	.642**	45
,002	.452**	45	,002	.452**	45
,007	.397**	45	,000	.591**	45
,134	,227	45	,372	,136	45
,299	,158	45	,016	.359*	45
,130	,229	45	,001	.469**	45
,084	,261	45	,084	,261	45
,044	.302*	45	,001	.494**	45
,002	.442**	45	,002	.442**	45
,008	.392**	45	,000	.707**	45
,000	.612**	45		1	45
	1	45	,000	.612**	45
,000	.504**	45	,000	.504**	45
,006	.403**	45	,000	.504**	45
,046	.300*	45	,046	.300*	45
,008	.392**	45	,000	.392**	45
,008	.392**	45	,001	.497**	45
,020	.346*	45	,000	.653**	45
,000	.609**	45	,000	.723**	45

Item 24		Item 23			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,000	.604**	45	,028	.328*	45
,001	.482**	45	,010	.378*	45
,002	.459**	45	,002	.459**	45
,000	.516**	45	,004	.418**	45
,009	.384**	45	,876	,024	45
,090	,256	45	,011	.376*	45
,001	.465**	45	,048	.296*	45
,016	.359*	45	,000	.559**	45
,040	.308*	45	,000	.500**	45
,431	,120	45	,135	,226	45
,006	.400**	45	,000	.503**	45
,028	.328*	45	,028	.328*	45
,002	.459**	45	,000	.559**	45
,000	.543**	45	,016	.357*	45
,008	.389**	45	,001	.493**	45
,022	.341*	45	,000	.507**	45
,040	.308*	45	,000	.500**	45
,019	.348*	45	,019	.348*	45
,001	.496**	45	,009	.386**	45
,001	.463**	45	,000	.572**	45
,000	.504**	45	,000	.504**	45
,006	.403**	45	,000	.504**	45
,000	.585**	45		1	45
	1	45	,000	.585**	45
,000	.660**	45	,000	.559**	45
,000	.680**	45	,000	.572**	45
,017	.355*	45	,000	.572**	45
,000	.631**	45	,000	.631**	45
,000	.734**	45	,000	.752**	45

Item 26		Item 25			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,000	.583**	45	,001	.471**	45
,001	.463**	45	,002	.459**	45
,031	.322*	45	,031	.321*	45
,001	.492**	45	,053	,291	45
,002	.452**	45	,029	.325*	45
,003	.427**	45	,005	.410**	45
,022	.341*	45	,027	.330*	45
,000	.532**	45	,000	.612**	45
,001	.463**	45	,084	,261	45
,077	.267	45	,302	,157	45
,015	.359*	45	,017	.354*	45
,049	.295*	45	,050	,294	45
,031	.322*	45	,004	.418**	45
,006	.404**	45	,001	.477**	45
,033	.318*	45	,000	.504**	45
,171	,208	45	,015	.362*	45
,014	.363*	45	,000	.540**	45
,047	.297*	45	,009	.387**	45
,000	.560**	45	,000	.749**	45
,000	.545**	45	,000	.532**	45
,008	.392**	45	,046	.300*	45
,008	.392**	45	,046	.300*	45
,000	.572**	45	,000	.559**	45
,000	.680**	45	,000	.660**	45
,000	.742**	45	1	1	45
		45	,000	.742**	45
,000	.545**	45	,003	.427**	45
,000	.503**	45	,001	.494**	45
,000	.730**	45	,000	.728**	45

Item 28		Item 27			
Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
,016	.358*	45	,049	.295*	45
,004	.419**	45	,017	.355*	45
,001	.494**	45	,031	.322*	45
,017	.354*	45	,056	.287	45
,749	,049	45	,623	,075	45
,065	,278	45	,003	.427**	45
,033	.318*	45	,279	,165	45
,008	.391**	45	,031	.322*	45
,025	.334*	45	,082	,262	45
,104	,246	45	,307	,156	45
,000	.643**	45	,000	.575**	45
,002	.452**	45	,001	.487**	45
,000	.801**	45	,000	.637**	45
,059	,284	45	,006	.404**	45
,006	.407**	45	,003	.427**	45
,002	.444**	45	,010	.380**	45
,003	.432**	45	,000	.564**	45
,000	.575**	45	,006	.401**	45
,000	.527**	45	,002	.445**	45
,000	.613**	45	,000	.545**	45
,000	.653**	45	,001	.497**	45
,020	.346*	45	,008	.392**	45
,000	.631**	45	,000	.572**	45
,000	.631**	45	,017	.355*	45
,001	.494**	45	,003	.427**	45
,000	.503**	45	,000	.545**	45
,000	.613**	45	1	1	45
	1	45	,000	.613**	45
,000	.764**	45	,000	.687**	45

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah			N
N	Sig. (2-tailed)	Pearson Correlation	N
45	,000	.562**	45
45	,000	.610**	45
45	,000	.654**	45
45	,000	.648**	45
45	,012	.372*	45
45	,002	.448**	45
45	,032	.321*	45
45	,000	.665**	45
45	,000	.539**	45
45	,015	.360*	45
45	,000	.715**	45
45	,000	.619**	45
45	,000	.756**	45
45	,000	.537**	45
45	,000	.650**	45
45	,000	.627**	45
45	,000	.555**	45
45	,000	.579**	45
45	,000	.693**	45
45	,000	.705**	45
45	,000	.723**	45
45	,000	.609**	45
45	,000	.752**	45
45	,000	.734**	45
45	,000	.728**	45
45	,000	.730**	45
45	,000	.687**	45
45	,000	.764**	45
45		1	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)

Correlations

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14	Item 15	Item 16	Item 17	Item 18	Item 19	Item 20	Variabel X3
Item 1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .723** .000 45	.600** .000 45	.529** .000 45	.529** .000 45	.589** .000 45	.525** .000 44	.558** .000 45	.674** .000 45	.529** .000 45	.707** .000 45	.366** .014 45	.589** .000 45	.381** .010 45	.577** .000 45	.475** .001 45	.643** .000 45	.589** .000 45	.529** .000 45	.589** .000 45	.775** .000 45
Item 2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.723** .000 45	1 .723** .000 45	.653** .000 45	.547** .000 45	.514** .000 45	.543** .000 44	.592** .000 45	.487** .001 45	.440** .003 45	.711** .000 45	.395** .007 45	.600** .000 45	.612** .000 45	.502** .000 45	.395** .007 45	.653** .000 45	.711** .000 45	.333** .026 45	.489** .001 45	.769** .000 45
Item 3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.600** .000 45	.723** .000 45	1 .529** .000 45	.643** .000 45	.589** .000 45	.525** .000 44	.657** .000 45	.472** .001 45	.643** .000 45	.707** .000 45	.475** .001 45	.471** .001 45	.693** .000 45	.577** .000 45	.585** .000 45	.643** .000 45	.707** .000 45	.643** .000 45	.471** .001 45	.817** .000 45
Item 4	Pearson Correlation	.529** .000 45	.653** .000 45	.529** .000 45	1 .486** .000 45	.603** .000 45	.353** .000 45	.608** .000 45	.548** .000 45	.486** .000 45	.535** .000 45	.318** .000 45	.401** .000 45	.367** .000 45	.582** .000 45	.442** .000 45	.486** .000 45	.668** .000 45	.357** .000 45	.668** .000 45	.700** .000 45

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,001	,000	,019	,000	,000	,001	,000	,033	,006	,013	,000	,002	,001	,000	,016	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 5	Pearson Correlation	.529**	.547**	.643**	.486**	1	.485**	.612**	.273	.433**	.486**	.668**	.193	.267	.367*	.255	.442**	.486**	.535**	.614**	.668**	.652**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001		,001	,000	,070	,003	,001	,000	,203	,076	,013	,091	,002	,001	,000	,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 6	Pearson Correlation	.589**	.514**	.589**	.603**	.485**	1	.719**	.653**	.748**	.839**	.662**	.550**	.417**	.351*	.654**	.664**	.721**	.784**	.721**	.662**	.849**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,004	,018	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 7	Pearson Correlation	.525**	.543**	.525**	.353*	.612**	.719**	1	.492**	.661*	.741**	.666**	.313	.397**	.481**	.250	.564**	.612**	.666**	.612**	.666**	.748**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,019	,000	,000		,001	,000	,000	,000	,038	,008	,001	,102	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Item 8	Pearson Correlation	.558**	.592**	.657**	.608**	.273	.653**	.492**	1	.542**	.608**	.557**	.658**	.673**	.653**	.733**	.550**	.496**	.557**	.685**	.441**	.777**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,070	,000	,001		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,009	,002	,000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Item 9	Pearson Correlation	.674**	.487**	.472**	.548**	.433**	.748**	.661**	.542**	1	.777**	.715**	.283	.477**	.327	.519**	.616**	.663**	.715**	.663**	.715**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.059	.001	.028	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 10	Pearson Correlation	.529**	.440**	.643**	.486**	.486**	.839**	.741**	.608**	.777**	1	.802**	.442**	.401**	.367	.582**	.815**	.614**	.802**	.743**	.668**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.006	.013	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 11	Pearson Correlation	.707**	.711**	.707**	.535**	.668**	.662**	.666**	.557**	.715**	.802**	1	.362	.444**	.417**	.635**	.750**	.668**	.861**	.668**	.722**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.015	.002	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 12	Pearson Correlation	.366*	.395**	.475**	.318*	.193	.550**	.313*	.658**	.283	.442**	.362	1	.750**	.550**	.640**	.278	.442**	.362	.318*	.233	.593**
	Sig. (2-tailed)	.014	.007	.001	.033	.203	.000	.038	.000	.059	.002	.015	.000	.000	.000	.000	.064	.002	.015	.033	.124	.000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 13	Pearson Correlation	.589**	.600**	.471**	.401**	.267	.417**	.397**	.673**	.477**	.401**	.444**	.750**	1	.662**	.522**	.233	.401**	.306	.267	.306	.636**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.006	.076	.000	.008	.000	.001	.006	.002	.000	.000	.000	.000	.124	.006	.041	.076	.041	.000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 14	Pearson Correlation	.381**	.612**	.693**	.367*	.367*	.351*	.481**	.653**	.327*	.367*	.417**	.550**	.662**	1	.454**	.208	.485**	.417**	.367*	.294*	.629**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.000	.013	.013	.018	.001	.000	.028	.013	.004	.000	.000	.002	.011	.001	.004	.003	.013	.050	.000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 15	Pearson Correlation	.577**	.502**	.577**	.582**	.255	.654**	.250	.733**	.519**	.582**	.635**	.640**	.522**	.454**	1	.535**	.691**	.635**	.582**	.522**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.091	.000	.102	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 16	Pearson Correlation	.475**	.395**	.585**	.442**	.442**	.664**	.564**	.550**	.616**	.815**	.750**	.278	.233	.208	.535**	1	.567**	.750**	.691**	.621**	.732**
	Sig. (2-tailed)	.001	.007	.000	.002	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.064	.124	.171	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 17	Pearson Correlation	.643**	.653**	.643**	.486**	.486**	.721**	.612**	.496**	.663**	.614**	.668**	.442**	.401**	.485**	.691**	.567**	1	.802**	.743**	.668**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.002	.006	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 18	Pearson Correlation	.589**	.711**	.707**	.668**	.535**	.784**	.666**	.557**	.715**	.802**	.861**	.362**	.306**	.417**	.635**	.750**	.802**	1	.668**	.722**	.868**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,015	,041	,004	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 19	Pearson Correlation	.529**	.333	.643**	.357	.614**	.721**	.612**	.385**	.663**	.743**	.668**	.318	.267	.367	.582**	.691**	.743**	.668**		
	Sig. (2-tailed)	,000	,026	,000	,016	,000	,000	,000	,009	,000	,000	,000	,033	,076	,013	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 20	Pearson Correlation	.589**	.489**	.471**	.668**	.668**	.662**	.666**	.441**	.715**	.668**	.722**	.233	.306	.294	.522**	.621**	.668**	.722**	.668	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,001	,000	,000	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,124	,041	,050	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Pearson Correlation	.775**	.769**	.817**	.700**	.652**	.849**	.748**	.777**	.788**	.836**	.868**	.593	.636	.629	.758	.732	.820	.868	.756	.768
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Correlations

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Variabel Y
Item 1	Pearson Correlation	1	.653**	.541**	.386**	.327*	.189	.481**	.627**	.753**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,009	,028	,214	,001	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 2	Pearson Correlation	.653**	1	.556**	.289	.333*	.226	.534**	.591**	.754**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,054	,026	,135	,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 3	Pearson Correlation	.541**	.556**	1	.331*	.575**	.299*	.585**	.276	.752**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,026	,000	,046	,000	,066	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 4	Pearson Correlation	.386**	.289	.331*	1	.535**	.588**	.471**	.384**	.689**
	Sig. (2-tailed)	,009	,054	,026		,000	,000	,001	,009	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Item 5	Pearson Correlation	.327*	.333*	.575**	.535**	1	.427**	.529**	.103	.668**
	Sig. (2-tailed)	.028	.026	.000	.000		.003	.000	.502	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 6	Pearson Correlation	.189	.226	.299*	.588**	.427**	1	.476**	.155	.599**
	Sig. (2-tailed)	.214	.135	.046	.000	.003		.001	.308	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 7	Pearson Correlation	.481**	.534**	.585**	.471**	.529**	.476**	1	.339*	.787**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.001	.000	.001		.023	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Item 8	Pearson Correlation	.627**	.591**	.276	.384**	.103	.155	.339*	1	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.066	.009	.502	.308	.023		.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Pearson Correlation	.753**	.754**	.752**	.689**	.668**	.599**	.787**	.617**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- **Uji Reabilitas**

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	11

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Daerah (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.941	28

Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.960	20

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.851	8

Uji Asumsi Klasik

- **Uji Normalitas**

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96725432
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.113
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

- **Uji Multikolinieritas**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.870	3.982		2.227	.031		
	Kompetensi SDM	-.002	.105	-.002	-.017	.987	.826	1.211
	Penerapan SAP	.005	.058	.014	.081	.935	.409	2.446
	Sistem AKD	.270	.071	.675	3.800	.000	.410	2.436

a. Dependent Variable: Kualitas LKP

- **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas Glesjer

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.331	2.474		1.751	.088
Kompetensi SDM	.009	.065	.022	.131	.897
Penerapan SAD	-.067	.036	-.433	-1.854	.071
Sistem AKD	.045	.044	.240	1.027	.310

a. Dependent Variable: Kualitas LKP

Uji Hipotesis

- **Uji Parsial (Uji t)**

Uji Regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.628	3.702		4.221	.000
Kompetensi SDM	.327	.108	.418	3.021	.004

a. Dependent Variable: Kualitas LKP

Uji Regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.107	3.858		2.879	.006
Penerapan SAD	.173	.043	.528	4.073	.000

a. Dependent Variable: Kualitas LKP

Uji Regresi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.975	2.899		3.095	.003
	Sistem AKD	.274	.044	.685	6.165	.000

a. Dependent Variable: Kualitas LKP

- **Uji Simultan (Uji F)**

Uji Anova Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standar Akuntaterhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	151.257	3	50.419	12.085	.000 ^b
	Residual	171.054	41	4.172		
	Total	322.311	44			

a. Dependent Variable: Kualitas LKP

b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem AKD

- **Uji Koefisiensi Determinasi (R²)**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.469	.430	2.04256

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem AKD

Lampiran 5. Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI


Nama : Desy Cholifah
Nim/Jurusan : 15520015/Akuntansi
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu


No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	09 April 2019	Pengajuan Judul	1. ✓
2	29 April 2019	Konsultasi Bab 1-3	2. ✓
3	08 Mei 2019	Konsultasi Revisi Bab 1-3	3. ✓
4	22 Mei 2019	Konsultasi Revisi Bab 1-3	4. ✓
5	18 Juni 2019	ACC Proposal	5. ✓
6	29 Juli 2019	Konsultasi Kuesioner	6. ✓
7	12 November 2019	Konsultasi Bab 4-5	7. ✓
8	19 November 2019	Konsul Revisi bab 4	8. ✓
9	21 November 2019	Konsultasi bab 5	9. ✓
10	21 November 2019	Konsultasi Abstrak	10. ✓
11	25 November 2019	Konsultasi Revisi Abstrak	11. ✓
12	26 November 2019	ACC Keseluruhan	12. ✓

Malang, 26 November 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322-200801-2-005



Lampiran 6. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Desy Cholifah
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 09 Desember 1996
Alamat Asal : Desa Bangkal RT 001/RW 001 Kecamatan Kota Sumenep
Alamat Kos : Jl. Sunan Ampel 1 No 9 Lowokwaru Malang
Telepon/HP : 085203722219
Email : desycholiefah@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2009 : SDN Bangselok 1
2009-2012 : MTs Nurul Jadid Paiton
2012-2015 : MA Nurul Jadid Paiton
2015-2019 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2002-2006 : Madrasah Al- Wathoniyah Al- Islamiyah
2012-2013 : Diniyah Pondok Pesantren Nurul Jadid Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Nurul Jadid
2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
2017 : English Language Center (ELC) UIN

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta seminar training Entrepreneurship “Menumbuhkan Jiwa Wirausahawan Santri” Nurul Jadid Probolinggo tahun 2013.
- Peserta seminar “Merajut Tasawuf Dalam Realitas Sosial” IAI Nurul Jadid Probolinggo tahun 2014.

- Peserta Seminar “Peran Agama dan Media Dalam Konteks Sosial Budaya” Iman Malang Raya tahun 2016
- Peserta seminar “Tantangan akuntan muda menghadapi MEA” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015.
- Peserta kuliah Tamu & Accounting Study Club “Kombinasi Bisnis Syariah” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta pelatihan Bahasa Inggris di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017
- Peserta “Roadshow Seminar Pasar Modal Syariah” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018.
- Peserta pelatihan Program Akuntansi MYOB oleh LAB Akuntansi dan Pajak Jurusan Akuntansi FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018.
- Peserta seminar “Peran Perbankan Syariah dalam Menunjang Financial Tegnology Perguruan Tinggi” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, SE., MSA
NIP : 1976121020091
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

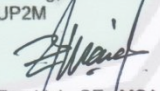
Nama : Desy Cholifah
NIM : 15520015
Handphone : 085203722219
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Email : desycholiefah@gmail.com
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
16%	13%	4%	2%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Desember 2019
UP2M


Zuraidah, SE., MSA
NIP. 1976121020091